

# SINERGI



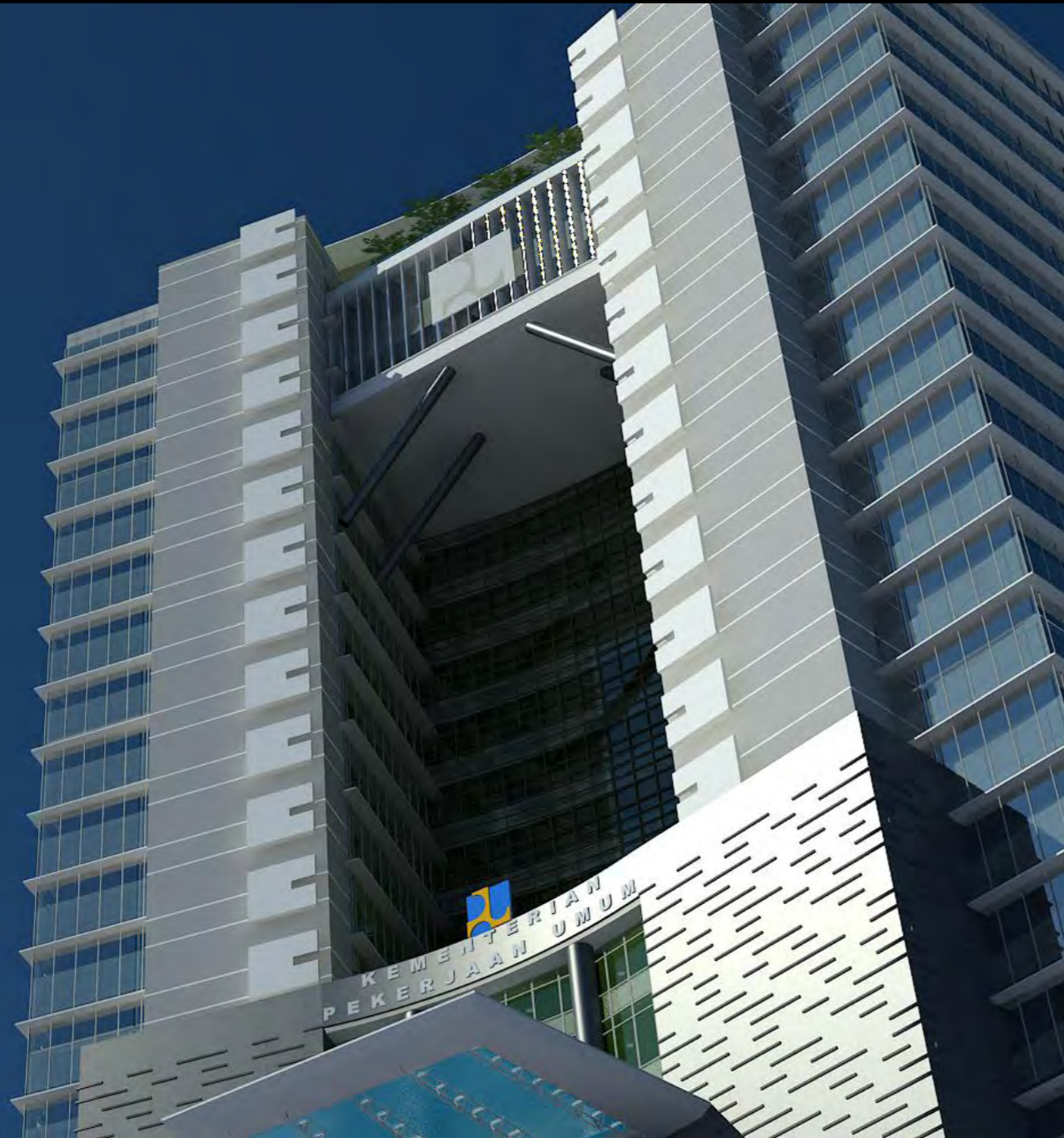
**Konsultasi Regional  
Kementerian PUPR  
Turut Mendorong Peningkatan  
SDM Untuk Pertumbuhan Berkualitas**

Ikuti  
Kuis BPIW  
di hal. 70





**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)  
KEMENTERIAN PUPR**



**Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR**  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210  
Email: humasbpiw@gmail.com Telp. +6221-2751 5804

## Salam Sinergi .....

Pembaca yang terhormat, Buletin Sinergi telah memasuki edisi 38. Tema besar pada edisi kali ini membahas sinkronisasi program infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2020 yang dilakukan melalui kegiatan Konsultasi Regional (Konreg). Hal itu dibahas dalam rubrik Kabar Utama. Pada rubrik tersebut juga ditampilkan tulisan-tulisan dari para pakar yang mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan perencanaan dan program infrastruktur sektor PUPR.

Peran perencanaan dan program terkait antisipasi bencana alam juga dibahas dalam Laporan Khusus. Pembahasan mengenai hal itu dikupas lebih lanjut dengan beberapa tulisan dari para ahli terutama dari Jepang. Mengingat negara tersebut sudah sangat maju dalam mengantisipasi bencana terutama bencana gempa.

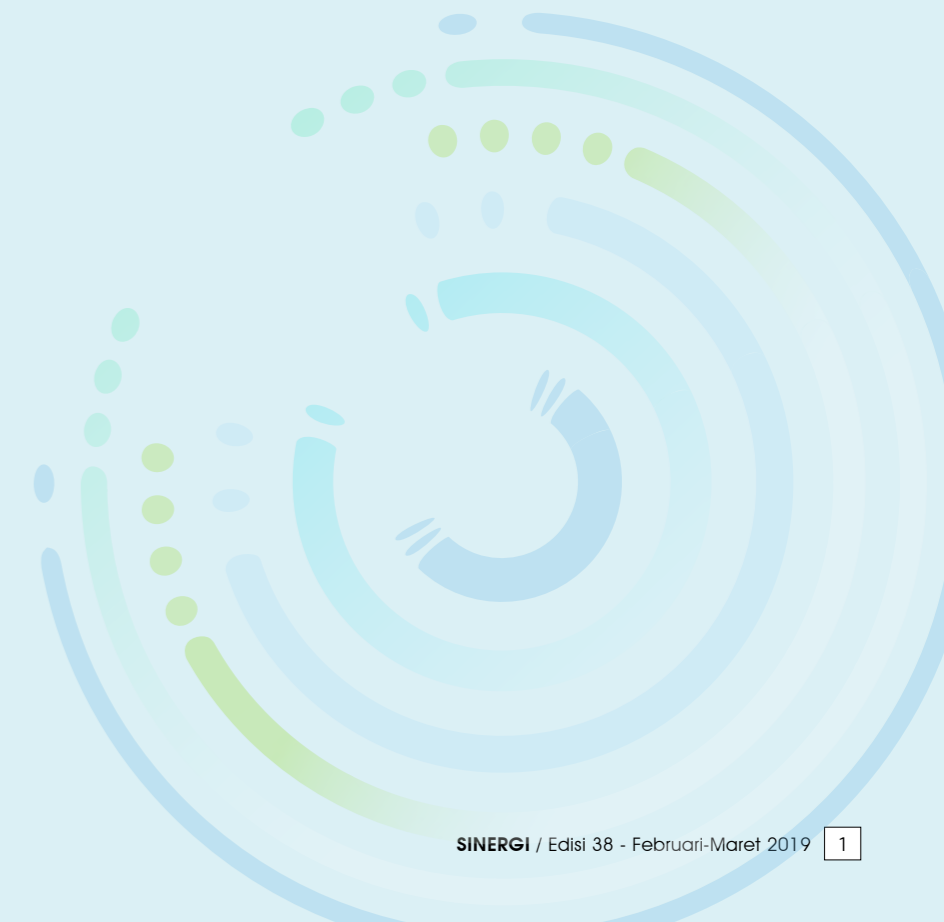
Dalam rubrik Wawancara menghadirkan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto. Ia memaparkan mengenai persiapan hingga pelaksanaan Konreg yang dilakukan BPIW.

Beberapa rubrik reguler tetap dihadirkan seperti Teknologi, Teropong Media, dan Serba-serbi. Rubrik ringan juga masih mewarnai Buletin Sinergi seperti Jalan-jalan, Tips, dan Potret. Souvenir disediakan bagi pembaca yang benar menjawab pertanyaan dari redaksi dalam Kuis BPIW.

Kami berharap sajian yang ada di Buletin Sinergi edisi kali ini dapat memenuhi harapan pembaca yang budiman serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Salam hormat,

**Redaksi**



**Tim Penyusun:**

**Pelindung:**  
Hadi Sucahyono

**Pengarah:**  
Firman Hatorangan Napitupulu

**Penasehat**  
Bobby Prabowo  
Iwan Nurwanto  
Kuswardono  
Agusta Ersada Sinulingga

**Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:**  
P. Yudantoro

**Redaktur Pelaksana:**  
Shovich

**Editor :**  
Hendra Djamal  
Mutri Batul Aini

**Tim Pembuat Artikel:**  
Indira Dwi Kusumatuti  
Daris Anugrah  
Alis Listalatu  
Rian Farhan

**Sekretariat:**  
Untung Priyono  
Nur Wahyu

**Diterbitkan oleh:**  
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  
(BPIW) Kementerian PUPR

**Alamat Redaksi:**  
Gedung G, BPIW Lantai 1  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com), [humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id)  
Website: [bpiw.pu.go.id](http://bpiw.pu.go.id)  
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:  
[humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com), [humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id)

Design : Heri Hito  
Infografis, layout & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi



## 4 Kabar Utama: Konsultasi Regional Kementerian PUPR Turut Mendorong Peningkatan SDM Untuk Pertumbuhan Berkualitas



**14 Pendapat Kongreg:**  
Anita Firmanti, Sekjen Kementerian PUPR:  
Tingkatkan Sinergitas Program Pembangunan  
Infrastruktur Pusat dan Daerah



**28 Produk BPIW:**  
Raja Ampat "Global Ecotourism"

**33 Jurnal Ilmiah**  
Manajemen Regenerasi dan Konservasi Kota  
di Cina: Studi Kasus Shanghai

**38 Teropong Media**  
Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak:

- Kementerian PUPR Dukung Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara Melalui ITMP
- Pembangunan Infrastruktur Mendukung Terwujudnya Ketahanan Wilayah



**42 Lapsus:**  
Indonesia, Negeri yang Dikepung Ancaman  
Bencana Alam

**55 Analisis pakar**  
Bangunan Tahan Gempa di Indonesia



**54 Serba-Serbi:**  
Empat Infrastruktur Publik Ramah  
Gender

**55 Info grafis:** Sistem Informasi

**56 Jalan-jalan**  
Berwisata Di Bumi Rafflesia

**58 Kilas BPIW**  
Upaya Mitigasi Bencana Perlu Disiapkan

**66 Teknologi**  
Kementerian PUPR Kembangkan Teknologi  
yang Memanfaatkan Energi Air

## Konsultasi Regional Kementerian PUPR Turut Mendorong Peningkatan SDM Untuk Pertumbuhan Berkualitas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyusun program infrastruktur untuk tahun anggaran 2020 melalui Konsultasi Regional (Konreg) di empat kota pada Februari-Maret. Sinkronisasi program tersebut dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait infrastruktur PUPR baik pusat maupun daerah, untuk turut mendorong tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yaitu "Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas".

Program pembangunan infrastruktur sektor PUPR tidak serta merta ada tanpa melalui proses sinkronisasi program antara pusat dan daerah. Urun rembuk sinkronisasi program seluruh daerah di Indonesia ini dilakukan di empat kota yakni Mataram, Aceh, Makassar, dan Bogor.

Sebuah perhelatan akbar seperti Konreg yang *outcomenya* berupa program usulan pembangunan infrastruktur sektor PUPR, sudah sepatutnya memiliki landasan yang kuat. Untuk itulah Konreg sejalan dengan tema RKP 2020. Terkait RKP tersebut, maka yang dapat dilakukan dengan dukungan pembangunan infrastruktur PUPR yakni berupa percepatan pemenuhan standar minimal untuk pelayanan dasar publik seperti pendidikan dan kesehatan di daerah serta tunjangan khusus bagi tenaga kesehatan dan pendidikan.

Selanjutnya, yang dapat dilakukan adalah dukungan pembangunan infrastruktur PUPR dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan khusus.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan Kementerian PUPR perlu mengantisipasi dinamika perekonomian dunia, seperti normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, maupun keamanan dan geopolitik dunia. "Perlu juga dilakukan inovasi dan sinergi pembiayaan yang melibatkan pihak swasta," ujar Basuki saat Konreg di Aceh beberapa waktu lalu.

Basuki juga menyampaikan bahwa saat sidang kabinet terkait RKP untuk 2020 di Jakarta beberapa waktu lalu Presiden berpesan bahwa

*Sebuah perhelatan akbar seperti Konreg yang outcomenya berupa program usulan pembangunan infrastruktur sektor PUPR, sudah sepatutnya memiliki landasan yang kuat. Untuk itulah Konreg ini sejalan dengan tema RKP 2020. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan SDM tetap diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.*



Jalan Tol Cikampek-Palimanan

Sumber: PUPR

*Konreg merupakan bagian dari pertanggungjawaban program yang telah dilaksanakan dan juga program-program pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan di setiap kawasan.*

perlu adanya pelaksanaan tahapan kerja teknokratik, agar kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2020, tetap berjalan. Disamping itu, pembangunan SDM tetap diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.

Ia menjelaskan, setiap tahun Kementerian PUPR harus melakukan tiga hal penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur PUPR, yakni evaluasi terhadap program yang telah dilakukan, memastikan program tahun berjalan tercapai, dan melakukan pemrograman untuk

“Strategi pengembangan infrastruktur PUPR lainnya adalah pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Ada juga strategis pemantapan ketahanan air, pemerataan pembangunan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi,” papar Hadi.

Hadi juga mengatakan, Kementerian PUPR dalam melakukan pengembangan infrastruktur saat ini menggunakan pendekatan berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Seluruh wilayah di Indonesia telah dikelompokkan ke dalam 35 WPS.

untuk KEK ada Arun, Sei Mangkei, Tanjung Api-Api, dan Tanjung Kelayang.

“Pendekatan WPS diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung,” ungkap Hadi.

Secara makro Konreg yang juga dilakukan melalui *video conference* tersebut mendukung visi Indonesia tahun 2045, yang terdiri dari empat pilar yaitu Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu dan Teknologi (IPTEK), Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, Ketahanan Nasional, dan Tata Kelola Pemerintahan.

Konreg merupakan bagian dari pertanggungjawaban program yang telah dilaksanakan dan juga program-program pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan di setiap kawasan.

Di sisi lain, Prioritas Nasional terdiri dari lima prioritas. Pertama, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Kedua, infrastruktur dan pemerataan wilayah. Prioritas yang ketiga adalah nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja. Kemudian, prioritas yang keempat adalah ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Prioritas Nasional yang kelima adalah stabilitas pertahanan dan keamanan.

Secara khusus Kementerian PUPR melalui unit organisasinya



merespon lima Prioritas Nasional tersebut, di mana pada prioritas pertama dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Penyediaan Perumahan. Sementara prioritas nasional yang kedua direalisasikan Direktorat Bina Marga. Sedangkan prioritas nasional yang keempat dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya Air.

Kementerian PUPR juga mendukung pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yakni Peningkatan Investasi dan Daya Saing Ekonomi, Percepatan Industri dan Pariwisata, dan Pembangunan Ekonomi Maritim.

Dukungan pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan tersebut juga terkait Pemantapan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Ketahanan Energi dan Air, serta Komitmen Terhadap Lingkungan Hidup.

Dari sisi dukungan Kementerian PUPR terhadap pilar Pemerataan Pembangunan berupa Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Pemerataan Kesempatan Usaha

*“Pendekatan WPS diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur PUPR yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasan Barat dan Timur serta pembangunan berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung,” ungkap Hadi.*



tahun berikutnya. Terkait strategi pengembangan infrastruktur PUPR 2020-2024, menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono ada beberapa strategi seperti memajukan sektor industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Kemudian, mendukung destinasi unggulan pariwisata, serta mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia.

Dalam WPS itu terdapat kawasan tematik yang didukung pengembangnya, seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).

Ia mencontohkan, untuk kawasan industri yang didukung infrastruktur sektor PUPR seperti Kuala Tanjung, Tanggamus, Dumai, Tanjung Buton serta Batu Licin. Kemudian,



Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

dan Pendapatan, Pemerataan Pembangunan Wilayah, serta Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi.

Untuk poin mengenai Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi, sangat sejalan dengan visi Kementerian PUPR yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Teknokratik Kementerian PUPR tahun 2020-2024 yaitu "Infrastruktur

yang Berdaya Saing, Merata dan Berkeadilan serta Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat".

Dari visi tersebut ada 11 misi yang menjadi langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian dari misi-misi tersebut adalah empat misi yang berkaitan dengan Konreg. Misi pertama adalah mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan ekonomi yang disertai dengan pengarusutamaan infrastruktur hijau dan infrastruktur tangguh

bencana. Misi ini dilaksanakan dengan mendukung beberapa Kawasan Strategis misalnya KI, KEK, Metropolitan dan Kota Baru, KPPN, dan KSPN.

Misi yang kedua yakni mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, misi yang ketiga adalah meningkatkan peran penelitian dan pengembangan (litbang) dan IPTEK yang makin maju yang dapat berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur yang efisien dan memiliki produktivitas yang tinggi. Misi yang keempat adalah meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan jasa konstruksi, menguatkan regulasi serta memberdayakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Sejalan dengan visi Indonesia 2045, maka pembangunan infrastruktur harus sama dengan arah pembangunan dunia diantaranya *Sustainable Development Goals (SDGS)*, *New Urban Agenda (NUA)*, Rencana Aksi Nasional dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-



Dukungan Pembangunan Infrastruktur PUPR tertuang pada Hasil Konreg tahun anggaran 2020 terhadap beberapa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diantaranya KSPN Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo.



Kebersamaan para pejabat di Konreg Makassar

Sumber: PUPR

MAPI), serta Pengarusutamaan Gender (PUG). Implikasi SDGs terhadap arahan pengembangan infrastruktur PUPR berupa dukungan terhadap perwujudan ketahanan air dan kedaulatan pangan termasuk peningkatan kapasitas air baku baik untuk irigasi maupun air bersih.

Implikasi SDGs terhadap arahan pengembangan infrastruktur PUPR yang lain adalah pengelolaan sumber daya air, dukungan infrastruktur PUPR untuk mendorong perkembangan wilayah melalui pengembangan seluruh kawasan strategis dan seluruh MBR. Hal ini dilakukan agar MBR memiliki akses terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan hunian layak.

Peningkatan kinerja infrastruktur mendukung permukiman baik dalam bentuk peningkatan cakupan pelayanan maupun peningkatan kapasitas infrastruktur eksisting agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. Dengan demikian

akan mendorong terwujudnya kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Diharapkan juga penyelenggaraan infrastruktur dilakukan untuk mengurangi disparitas antarwilayah dan beradaptasi pada Rencana Aksi Nasional dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-MAPI).

**Dukungan Infrastruktur PUPR Direspon Positif Pemerintah Daerah**

Dukungan Pembangunan Infrastruktur PUPR tertuang pada Hasil Konreg tahun anggaran 2020 terhadap beberapa KSPN diantaranya KSPN Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Dukungan Pembangunan Infrastruktur PUPR hasil Konreg terhadap beberapa Kota Baru diantaranya Kota Baru Tanjung Selor, Sofifi, dan Maja.

Kemudian, Dukungan Pembangunan Infrastruktur PUPR juga terkait terhadap Pulau Kecil Terluar (PKT) diantaranya pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau seperti Anambas, Bintan, Karimun, dan Natuna. Sedangkan untuk misi untuk mengembangkan pembiayaan

Untuk peningkatan SDM Konstruksi dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk memperkuat tenaga kerja konstruksi di lapangan dan internal PUPR.

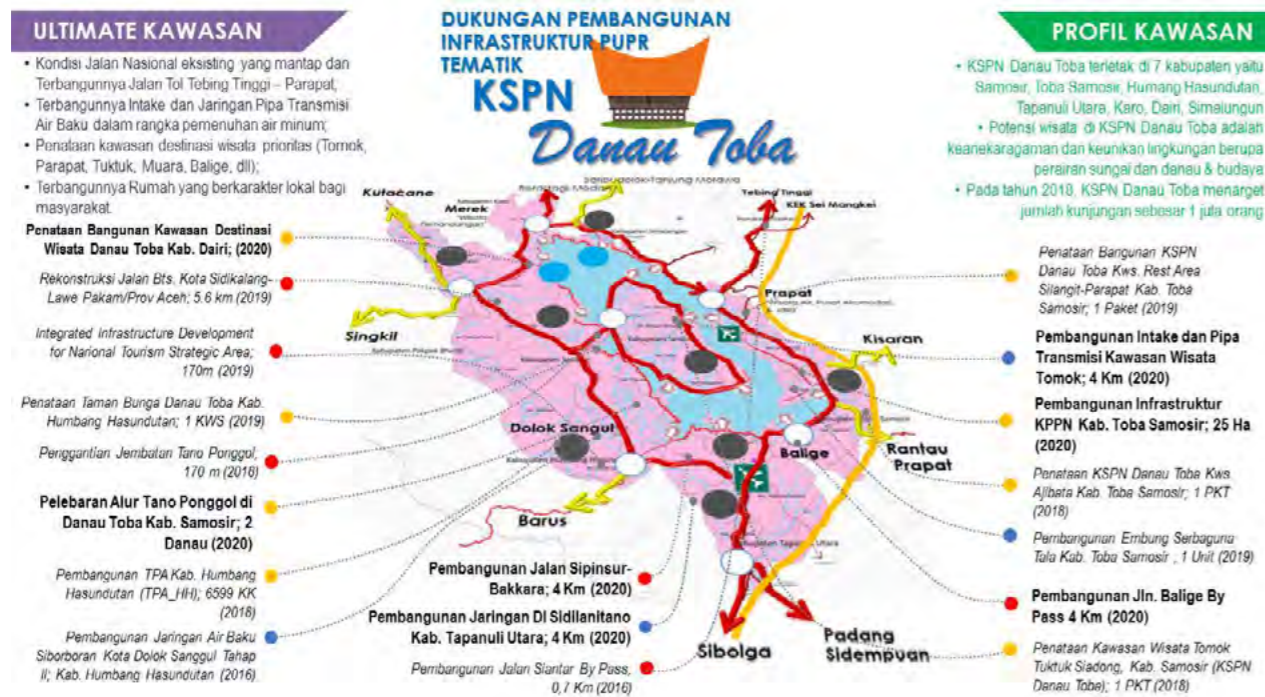
Skema alternatif pembiayaan tersebut diantaranya, melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) baik penunjukan BUMN maupun swasta murni.

kreatif dan inovatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mulai dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, melalui penyisiran hasil konreg 2019 yang sekiranya dapat dilakukan melalui berbagai alternatif pembiayaan selain APBN. Skema alternatif pembiayaan tersebut diantaranya, melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) baik penunjukan BUMN maupun swasta murni.

Dukungan pengembangan IPTEK juga diperlukan dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang efektif dan

Daya Manusia (BPSPDM) untuk memperkuat tenaga kerja konstruksi di lapangan dan internal PUPR. Target pembinaan tenaga kerja konstruksi tahun anggaran 2019 mencapai 212.000 orang. Sedangkan total capaian peningkatan kompetensi dan uji sertifikasi mencapai 101.467 orang.

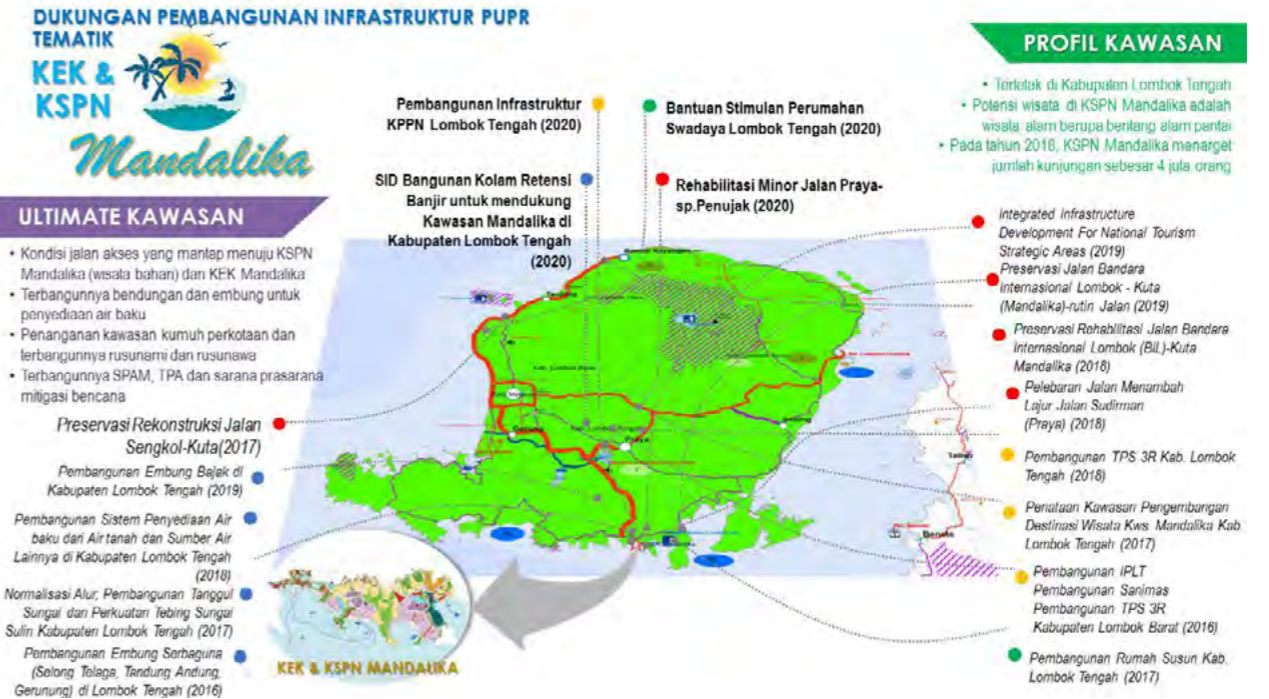
Usulan anggaran untuk program *baseline* 2020 Bidang Sumber Daya Air mencapai Rp 50,445 triliun. Anggaran tersebut untuk pembiayaan beberapa program seperti pembangunan infrastruktur seperti Lanjutan Pembangunan 36 Bendungan (*on going* konstruksi dan tindak lanjut pendayagunaan bendungan terbangunnya). Selain itu ada program pembangunan lima



efisien, sehingga penerapan teknologi baru diharapkan dapat mengurangi biaya infrastruktur dan meningkatkan kehandalan infrastruktur itu sendiri. Untuk peningkatan SDM Konstruksi dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber

Bendungan Baru yakni Bendungan Kusan, Simeuleum, Cipanun, Sepaku Semoi, dan Merangin.

Selanjutnya ada pembangunan 391,7 Km Irigasi (termasuk Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lereh, Oransabari, Masabo, Gilireng, Salugan), serta Program Percepatan Peningkatan



Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang tersebar di 33 provinsi.

Pada bidang Bina Marga, usulan anggarannya mencapai Rp 52,680 miliar. Beberapa usulan program *baseline* 2020 seperti Pembangunan Jalan Akses PLBN Sota Merauke sepanjang 2,2 km dan Jalan Bofuer – Simpang Moyana – Wonama sepanjang 20 km. Usulan program lainnya seperti program infrastruktur Jalan Bula – Masiwang – Air Nanang sepanjang 10 km dan Jalan Werinama – Kota Baru – Air Nanang sepanjang 18 km.

Kemudian ada program infrastruktur Jalan Sofi – Wayabula sepanjang 12 km, Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang, dan lanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu serta pembangunan infrastruktur jembatan gantung yang tersebar di seluruh provinsi.

Usulan anggaran *baseline* untuk program infrastruktur bidang Cipta Karya sebesar Rp. 20,966 miliar. Beberapa usulan program infrastruktur bidang ini seperti

Penataan Kawasan pada 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jagoi Babang, Sei Kelik, Entikong, dan Jasa – Kalimantan Barat; Sei Pancang- Kalimantan Utara; Waris dan Sota - Papua; Oepuli, Maritaeng, Napan- NTT).

Penataan Bangunan dan Kawasan pada tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas, Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk 1.608.566 Kepala Keluarga (IKK) yakni TPA di Kab. Bone Bolango, Kab. Manokwari Selatan, dan TPA Kota Bengkulu.

Program usulan lainnya seperti Pembangunan dan Tindak Lanjut Enam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional (Banjarbakula, Durolis, Pekan-Kampar, Wasusokas, Sleman Sub Sistem Kebon Agung, dan Burana), dan Penanganan 1.666 Ha Kawasan Kumuh Perkotaan.

Kemudian ada kegiatan berupa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitas Berbasis Masyarakat

Ada program infrastruktur Jalan Sofi – Wayabula sepanjang 12 km, Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang, dan lanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu serta pembangunan infrastruktur jembatan gantung yang tersebar di seluruh provinsi.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah merespon positif atas penyelenggaraan Konreg, karena daerahnya dapat mengusulkan program yang akan direalisasikan Kementerian PUPR. Pasca bencana yang terjadi Juli 2018 lalu menurutnya Pemerintah Provinsi NTB bertekad memperbaiki kembali infrastruktur di kawasan pariwisata.

(Sanimas), serta pembangunan dan renovasi untuk pasar dan sekolah (termasuk renovasi Masjid Istiqlal Jakarta dan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Komplek Gelora Bung Karno serta pembangunan Kampus Universitas Internasional Islam Indonesia Depok).

Sedangkan untuk usulan anggaran bidang Penyediaan Perumahan mencapai Rp 10,167 triliun. Beberapa usulan program infrastruktur untuk bidang ini seperti Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tinanggea di Sulawesi Tenggara dan Rumah Khusus Nelayan daerah tertinggal Kec. Mangoli Tengah di Maluku Utara. Kemudian juga ada program Rumah Khusus Perbatasan di Kab. Sumba Timur Nusa Tenggara Timur dan Rumah Khusus di Morotai Maluku Utara.

Program usulan lainnya adalah Rumah Khusus untuk Masyarakat Daerah Tertinggal Kab. Asmat di Papua. Selanjutnya ada program

Rumah Susun (Rusun) untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Merangin dan Rusun MBR di Kab. Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi.

Tidak hanya itu, program usulan juga dilakukan untuk program Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk MBR Tinggi Tipe 36 sebanyak empat lantai di Kab. Karimun Kepulauan Riau dan Rumah Khusus Relokasi Bendungan Kuningan. Selanjutnya ada program Rumah Susun Pegawai Institut Teknologi Bandung (ITB) Kab. Cirebon dan Rumah Susun Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Total pembangunan rumah susun mencapai 5.600 unit, dan pembangunan rumah khusus sebanyak 5.646 unit, serta program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebar di beberapa kabupaten di Indonesia sebanyak 216.963 unit yang terdiri dari Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas dalam rangka



Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (dua dari kiri) dan Kepala BPIW Hadi Sucahyono (paling kiri) saat menghadiri Konreg di Aceh. Sumber: PUPR

mengurangi rumah tidak layak huni.

Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah berharap dukungan Kementerian PUPR dapat meningkatkan perekonomian, penuntasan kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran untuk menuju Aceh Hebat yang nantinya juga akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan Pulau Sumatera dan Indonesia.

Untuk mewujudkan hal itu, perlu kerja sama, sinergi dan hubungan

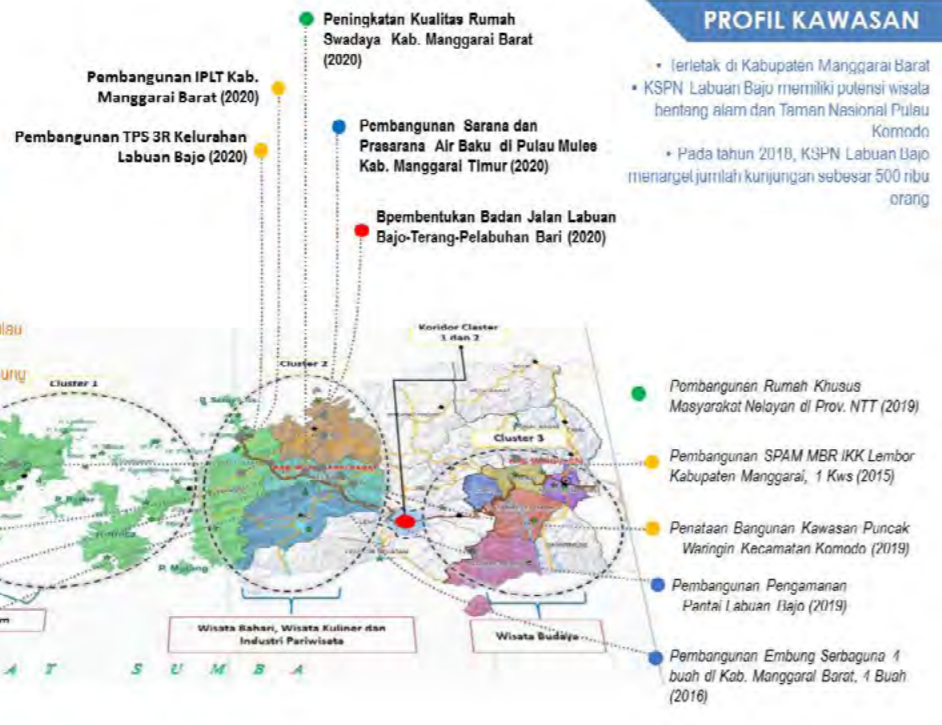
harmonis antara pusat, daerah, dan sektoral lainnya untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia Aceh dengan azas pembangunan yang fokus, bertahap, tuntas, dan berkelanjutan. (DZA/Dina/Redaksi)

DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR TEMATIK KSPN Labuan Bajo

ULTIMATE KAWASAN

- Terbangunnya infrastruktur air bersih untuk memenuhi kebutuhan kawasan perkotaan Labuan Bajo
- Terbangunnya jalan yang memenuhi standar untuk menghubungkan antar destinasi wisata di Labuan Bajo
- Revitalisasi Kawasan Destinasi Wisata Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Punggu
- Penataan dan peningkatan infrastruktur di kawasan Kampung Ujung, Kampung Tengah, dan Kampung Air

- Penanganan Sanitasi Kawasan KSPN Pulau Komodo, 1 Kws (2017)
- Pembangunan Jalan Labuan Bajo - Terang - Pelabuhan Bari II (2019)
- Pembangunan Jalan Labuan Bajo - Bolong - Terang - Kedindi, 24,5 Km (2017)
- Pembangunan SPAM MBR Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, 1 Kws (2015)
- Pembangunan Embung Kecil 6 buah di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat (2015)



PROFIL KAWASAN

- Terletak di Kabupaten Manggarai Barat
- KSPN Labuan Bajo memiliki potensi wisata bentang alam dan Taman Nasional Pulau Komodo
- Pada tahun 2018, KSPN Labuan Bajo menargetkan jumlah kunjungan sebesar 500 ribu orang

**HASIL KONREG TAHUN 2019**

**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

**TOTAL Rp. 20,966 Miliar**

BANGUNAN GEDUNG	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN
<p>a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan /Lingkungan 479.503 m2, a.l. Renovasi Masjid Istiqlal Jakarta dan Renovasi Gedung KONI Pusat Komplek GBK</p> <p>b. Penyelenggaraan Bangunan Gedung mendukung PON Papua XX</p> <p>c. Penataan Kawasan PLBN di 10 PLBN yaitu PLBN Jagor, Babang, Sei Kelik, Sei Pancang, Long Midang, Long Nawang, Labang, Depoli, Napah, Sota dan Yelektun</p>	<p>a. Rehabilitasi Prasarana Infrastruktur Pendidikan Dasar dan Menengah</p> <p>b. Rehabilitasi Prasarana Infrastruktur Madrasah dan Sekolah Keagamaan</p>
AIR MINUM	SANITASI
<p>a. Pengembangan SPAM Perkotaan 3427,5 U/det, a.l. SPAM Gambung Kab Bandung dan SPAM Kab. Jepara</p> <p>b. Pengembangan SPAM Kawasan Khusus 410 U/det, a.l. Pembangunan SPAM Gorontalo, Kab. Sabu Rajua IP. Kecil Tertuari dan Pembangunan SPAM di Kawasan Rawan Air Kws Kilwaru Kec Seram Timur</p> <p>c. Pembangunan SPAM Regional 1590 U/det, a.l. SPAM Regional Banjarbakula, Durulis, Pekan-Kampar, Wasusokas, Sub Sistem Keban Agung dan Burana</p>	<p>a. Pengelolaan Air Limbah 1,89 juta KK, a.l. SPALD-1 Kota Depok, SPAL Kota Ternate, dan Jakarta Sewerage Development Program</p> <p>b. Penanganan Persampahan 1,6 juta KK, a.l. TPA Regional Pekan-Kampar, Mammitarang Samboja dan Balikpapan</p>
PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN	
<p>a. Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan 1.666,2 Ha, a.l. Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh Klasabi Kota Sorong, Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh, Kawasan Setiamah Kota Cimahi, dll</p> <p>b. Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan 15.000 Ha, a.l. KPPN Wongsari, KPPN Air Gegas, KPPN Nyada, KPPN Misoel, dll</p> <p>c. Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus 175 Ha, a.l. untuk kawasan perbatasan, PKT, dan kawasan khusus lainnya</p>	





## Tingkatkan Sinergitas Program Pembangunan Infrastruktur Pusat dan Daerah

**Prof. Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati, MT**  
Sekjen Kementerian PUPR

Saat ini kita sudah berada pada periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan akan memasuki masa transisi perencanaan jangka menengah menuju RPJMN 2020-2024.

Pelaksanaan Konreg tahun ini adalah forum konsolidasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan terkait perumusan program pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2020. Hal ini menjadi penting karena pada 2020 adalah periode pertama dari kabinet yang akan datang. Ditengah hiruk pikuk kegiatan pemerintahan, Kementerian PUPR harus tetap melakukan kegiatan konsultasi dalam rangka membuat program yang lebih baik.

Konreg tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKPP) 2020 yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk pertumbuhan berkualitas. Untuk menuju target RKPP tersebut ditetapkan lima prioritas nasional. Pertama, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Kita tahu untuk menjadi negara maju ada tiga hal yang harus kita lakukan yakni pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan melakukan reformasi birokrasi baik dalam struktural maupun kualitas birokrasi.

Kemajuan yang dialami Korea Selatan (Korsel) saat ini dapat menjadi contoh bagi kita, mengingat negara tersebut sempat menjadi negara yang belum maju pada 1960-an. Namun ketika mereka membangun infastruktur dari Seoul ke Busan, lama-lama perekonomian mereka berkembang dengan baik. Jadi, pasti semua tergantung infrastruktur dan kita ingin Indonesia menjadi negara maju dan Indonesia kini menuju cita-cita tersebut.

Prioritas nasional yang kedua yakni konektifitas dan pemerataan pembangunan, di mana Kementerian PUPR sudah mengerjakan pembangunan

infrastruktur seperti jalan, jembatan, perumahan dan permukiman. Ketiga, mencari nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja.

Selanjutnya prioritas nasional yang keempat, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Prioritas nasional yang kelima adalah stabilitas pertahanan dan keamanan.

Bappenas telah melakukan evaluasi capaian pelaksanaan tahun ke-4 RPJMN, yakni 2015-2018, di mana ada sembilan sasaran pokok yang tercapai yakni pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan baru, pembangunan jalan tol, pembangunan irigasi dan rawa, rehabilitasi irigasi, pembangunan waduk, pembangunan kota baru, pelatihan konstruksi dan sertifikasi tenaga konstruksi.

Namun demikian terdapat juga empat sasaran yang sulit kita capai, yakni pengendalian banjir, akses air minum, sanitasi bagi MBR, dan penyediaan hunian layak. Target-target inilah yang harus kita perhatikan dalam proses perencanaan program 2020.

Pelaksanaan Konreg 2019 diharapkan mencapai beberapa tujuan. Pertama adalah memastikan dan memantapkan sinkronisasi program pembangunan pusat-daerah. Yang kedua, memastikan keberlanjutan pembangunan dari RPJMN 2015-2019.

Tujuan ketiga yakni memprioritaskan empat sasaran yang belum tercapai di 2015-2019 yakni air minum, sanitasi, banjir, hunian layak. Selanjutnya, tujuan yang keempat ialah melaksanakan kegiatan khusus di Jawa, seperti jalan, destinasi wisata, ketahanan terhadap bencana alam. Kelima, alokasi anggaran ditingkatkan efisiensinya untuk belanja modal.

Kami juga berharap Konreg dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan infrastruktur dan kemajuan bangsa di masa depan.



## Perencanaan dan Pemrograman Harus Dilakukan Secara Transparan

**Ir. Widiarto, Sp.1**  
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di masing-masing unit organisasi (Unor) di lingkungan Kementerian PUPR harus diiringi dengan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dilakukan oleh unor sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan harus konsisten menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, proses pengendalian oleh Unor juga dapat dilakukan dengan mengawal konsistensi dalam pemrograman. Konsistensi ini penting untuk mencegah adanya revisi anggaran yang terlalu sering, karena hal itu berpotensi menurunkan kualitas kinerja organisasi.

Perencanaan dan pemrograman juga harus dilakukan secara transparan. Bila ada perubahan di dalam membuat dua hal itu, maka harus didokumentasikan dengan baik. Misalnya siapa yang mengusulkan perubahan dan alasan perubahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bila suatu saat terjadi permasalahan. Perencanaan berbeda dengan membuat list keinginan. Perencanaan dibuat berdasarkan prioritas kebutuhan, yang (sebelum 'yang' tdk boleh ada koma) diikuti dengan penyiapan kriteria kesiapan (readiness criteria). Itu yang nantinya menjadi pendukung nota keuangan dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL).

Untuk perencanaan dan pemrograman, BPIW yang menjadi leader nya, karena saat ini perencanaan dan pemrograman infrastruktur sektor PUPR berbasis wilayah. Jadi diharapkan BPIW tidak hanya menyusun list keinginan dari masing-masing daerah atau list keinginan masing-masing Direktorat Jenderal, tapi dapat melihat Wilayah Pengembangan Strategis mana yang perlu dukungan Kementerian PUPR. Kemudian wilayah tersebut seperti apa perkembangannya di masa datang,

tingkat perekonomian sampai berapa, tingkat pengangguran yang mau diselesaikan seberapa, dan gini rasio yang mau dicapai seperti apa. Hal itu yang perlu disusun perencanaannya oleh BPIW dan dapat menjadi panduan bagi unor-unor lain.

Sementara itu dari sisi pengawasan, Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian PUPR terhadap kinerja dan keuangan, agar kinerja Kementerian PUPR lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Pengawasan ini diatur dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal tidak hanya dilakukan tahunan, tetapi juga lima tahunan. Artinya apa yang sudah dilakukan unor sepanjang lima tahun ini (2015-2019) harus ada laporan keuangannya.

Laporan keuangan ini menjadi dasar dalam melakukan pemeriksaan terhadap akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran.

Sebagai bentuk dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, kita juga harus memastikan adanya upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran dalam pemrograman dan penganggaran. Pertama, kita harus menjaga agar tidak terjadi intervensi program yang melebihi kewenangan PUPR sebagai sebuah kementerian. Kedua, hindari penyalahgunaan wewenang, dan yang ketiga antisipasi potensi praktik suap dalam alokasi anggaran.

Kita sama-sama mengerti tugas dan fungsi Kementerian PUPR sangat rentan dalam proses lelang proyek atau pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu dalam pos-pos itu, kita harus menjaga agar tetap berjalan jujur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat Jenderal akan selalu berupaya membantu unor agar tidak melakukan pelanggaran tata kelola sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

# Efektifitas Konsultasi Regional dalam Mensikronkan Program Infrastruktur PUPR

Kegiatan pembahasan program tahunan infrastruktur sektor PUPR, biasanya diawali dengan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan dilanjutkan dengan Konsultasi Regional (Konreg). Namun tahun ini berbeda, di mana langsung dilaksanakan Konreg. Sebelum Konreg dilakukan beberapa kali pembahasan di tingkat pusat dan daerah.

Konreg telah dilaksanakan di empat lokasi, yaitu Mataram, Makassar, Banda Aceh, dan Bogor. Konreg di Lombok untuk Wilayah Kalimantan-Nusa Tenggara (20-22 Februari), di Makassar untuk Wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (28 Februari-1 Maret), di Banda Aceh untuk Wilayah Sumatera (11-13 Maret), dan di Bogor untuk wilayah Jawa-Bali (18-20 Maret).

Selain tatap muka, Konreg kali ini dilakukan uji coba pelaksanaan melalui *Video Conference* (Vicon). Untuk wilayah Kalimantan-Nusa Tenggara, provinsi yang menggunakan mekanisme penyelenggaraan Konreg jarak jauh ini adalah Kalimantan Selatan (25-26 Februari). Sedangkan untuk Wilayah Sulawesi-Maluku-Papua, adalah Sulawesi Utara (4-5 Maret), dan untuk wilayah Sumatera, yaitu Sumatera Utara (14-15 Maret), serta Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Jawa-Bali (21-22 Maret).

Kemudian, dari sisi waktu penyelenggaraan, pelaksanaan Konreg dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan. Sebelum 2015, Konreg dilakukan kurang lebih lima hari, namun setiap tahun berkurang, hingga akhirnya pada tahun ini hanya diselenggarakan tiga hari. Hal ini tidak lepas dari dukungan sistem informasi pemrograman (SIPro). Sistem yang sudah

dirancang pada 2015 ini merupakan sistem yang mengakomodasi proses pemrograman.

Dengan demikian proses *input* bahan Konreg lebih efektif dan efisien, karena dapat dilakukan komunikasi antar sistem secara dua arah. Selain itu, dapat dilakukan *input* secara lengkap mulai dari Sasaran Pembangunan Nasional hingga dukungan Sub Kawasan.

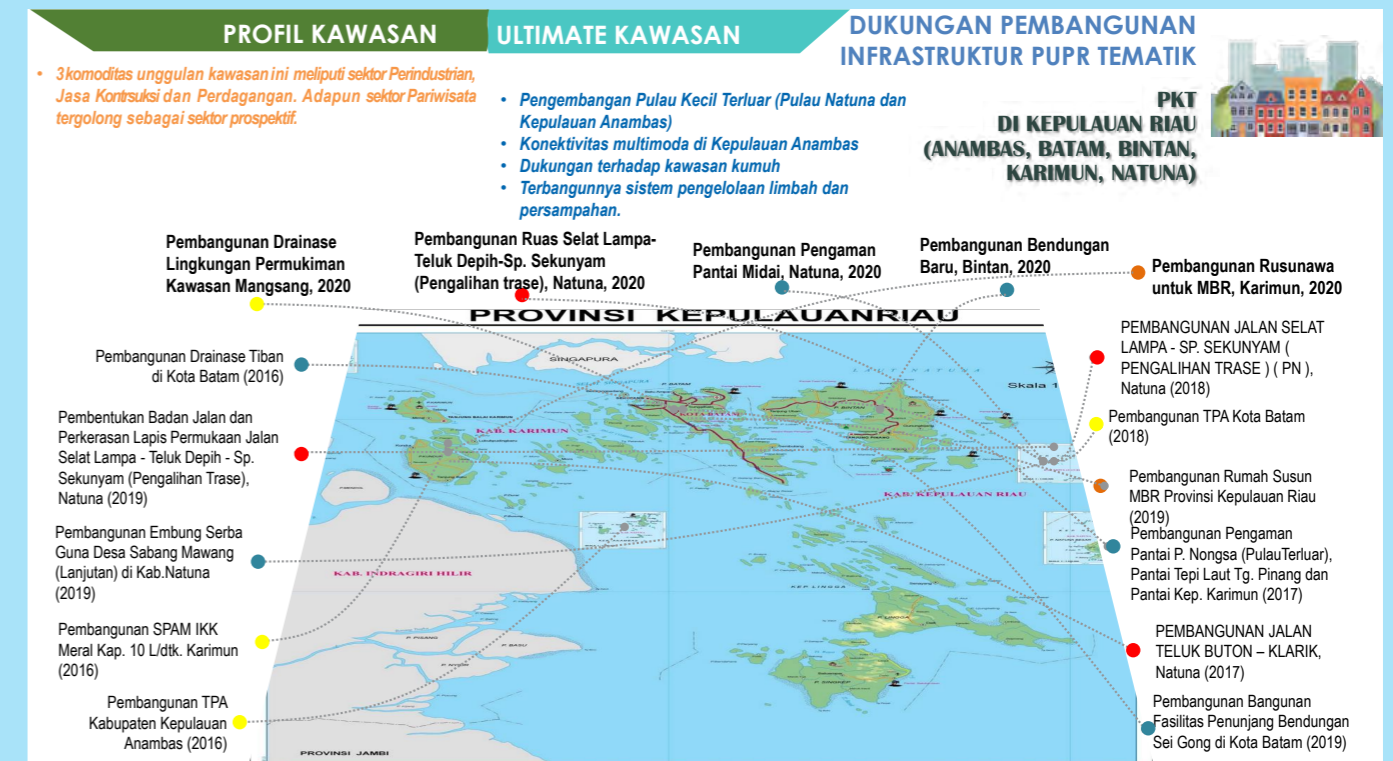
Hasil Konreg menunjukkan bahwa program *baseline* untuk Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebesar 55 persen dan untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 45 persen. Program-program yang dibuat juga mendukung pengembangan wilayah melalui konsep Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebesar 70 persen dan sebesar 30 persen tidak terkait dengan pengembangan wilayah atau kawasan tematik. Dari angka 70 persen tersebut maka ada 53 persen program di dalam kawasan strategis, 5 persen mendukung antar kawasan, dan antar WPS atau diluar kawasan sebesar 42 persen.

Rekapitulasi kebutuhan anggaran program hasil Konreg yang mendukung Prioritas Nasional 1 (Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar) sebesar 19 persen. Sedangkan untuk Prioritas Nasional 2 (Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman) sebesar 38 persen dan kebutuhan anggaran program yang mendukung Prioritas Nasional 4 (Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air) sebesar 43 persen.

Sinkronisasi keterpaduan empat sektor (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya,

dan Penyediaan Perumahan) untuk mendukung pengembangan kawasan seperti Pulau Kecil Terluar di Kepulauan Riau dapat dilihat pada infografis berikut :

penyelenggaraan) yang dinilai kurang efektif. Untuk Konreg di Bogor, 96 persen peserta merasa puas. Sisanya, peserta merasa tidak puas dengan konsumsi yang disediakan.



## Hasil Survei Menunjukkan, Peserta Puas Dengan Pelaksanaan Konreg

Pada pelaksanaan Konreg ini, telah dilakukan evaluasi kepuasan pelanggan, di mana para peserta menilai 11 kriteria penilaian, diantaranya ketepatan waktu penyampaian undangan pelaksanaan Konreg dan kejelasan materi arahan. Jumlah responden yang menilai mencapai 252 orang yang berasal dari Bappeda, Dinas PUPR Provinsi, Unit Organisasi Kementerian PUPR, Balai - balai, dan Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT).

Hasil analisis survei menunjukkan bahwa sebanyak 94,8 persen peserta menyatakan pelaksanaan Konreg di Mataram sudah baik. Sisanya menyatakan tidak puas terkait efektifitas waktu dan penyediaan ruang *meeting*.

Sebanyak 96,6 persen peserta menyatakan puas terhadap pelaksanaan Konreg di Makassar. Ketidakpuasan peserta terhadap efektifitas waktu penyelenggaraan masih mendominasi. Untuk Konreg yang dilaksanakan di Aceh, kepuasan peserta sebesar 94 persen. Untuk ketidakpuasan peserta terletak pada ruang *meeting* (tempat

Selain itu dilakukan juga evaluasi mengenai pelaksanaan Konreg melalui Vicon. Responden dari evaluasi kepuasan pelanggan ini terdiri dari Bappeda, Dinas, dan Balai/SNVT yang berjumlah 20 orang responden.

Kriteria penilaian melalui vicon ini beberapa diantaranya seperti ketepatan waktu dan kejelasan dalam diskusi pembahasan program. Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi kepuasan pelanggan, diketahui bahwa 87,6 persen peserta menyatakan puas. Sedangkan peserta yang tidak puas mencapai 12,4 persen, terutama dalam hal kelancaran vicon.

Dari hasil survei tersebut menunjukkan pelaksanaan Konreg baik tatap muka maupun melalui vicon menunjukkan bahwa sinkronisasi program sudah berjalan dengan baik. Program untuk kawasan timur dan barat Indonesia sudah mulai seimbang. Masukan-masukan dari hasil survei perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan Konreg kedepan, dapat berjalan efektif dan efisien. (Dina Rachmayati / Alfa Adib Ash Shiddiqi)



## Bila Berhasil Membuat Perencanaan, Berarti Merencanakan Keberhasilan

**Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.**  
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pelaksanaan Konreg di Lombok sangat berarti dan merupakan hadiah yang sangat besar bagi daerah kami. Apalagi Lombok sempat dilanda bencana alam beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan kehadiran Kementerian PUPR untuk membahas perencanaan infrastruktur dapat memberikan dampak positif bagi daerah kami supaya lebih baik di masa yang akan datang. Kami juga mengapresiasi terhadap BPIW yang menghadirkan program-program infrastruktur untuk NTB dan kami selalu siap untuk berkoordinasi membahas program infrastruktur tersebut.

Dalam penataan infrastruktur, yang harus dilakukan di NTB adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum. Selain itu kita harus berkonsentrasi memacu pengembangan pariwisata. Destinasi pariwisata harus diperbaiki termasuk sarana sanitasinya. Hal ini penting kita lakukan apalagi NTB terpilih sebagai destinasi halal dunia. Mudah-mudahan infrastruktur yang baik akan mampu mengobati duka yang mendera kita selama ini.

Dengan terobosan-terobosan dan inovasi yang dibuat Kementerian PUPR selama ini, maka kita meyakini target-target pembangunan

infrastruktur dapat tercapai. Tugas Kementerian PUPR bukan sekedar membangun perkotaan dan bukan juga sekedar memperbaiki jalan maupun jembatan. Namun Kementerian PUPR membangun infrastruktur untuk ketahanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun yang terpenting adalah perencanaan infrastruktur harus dilakukan secara maksimal. Sebab bila gagal membuat perencanaan, maka kita merencanakan kegagalan. Sebaliknya, bila berhasil membuat perencanaan maka kita merencanakan keberhasilan.

Kementerian PUPR mungkin satu-satunya kementerian yang sangat cepat merespon kondisi yang ada, sehingga apa yang direncanakan terlihat nyata dilapangan. Untuk membangun infrastruktur perlu memanfaatkan tenaga kerja lokal. Selain itu juga harus berani menggandeng kontraktor lokal. Hal ini perlu diperhatikan secara serius, karena sudah sepatutnya tenaga kerja dan kontraktor lokal diberdayakan untuk membangun negerinya sendiri. **(Hendra)**



## Sinkronisasi Perencanaan dan Program Sangat Penting

**Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, MEng.Sc**  
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR

Tahun Anggaran (TA) 2020 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang saat ini dalam proses penyusunan secara teknokratik. Program TA 2020 direncanakan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian periode 2015-2019 serta Visium Kementerian PUPR 2030.

Sehubungan dengan hal itu, maka pembangunan infrastruktur adalah proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) yang kembali dilaksanakan tahun ini, merupakan bagian dari keberlanjutan program infrastruktur tersebut. Oleh karenanya sinkronisasi perencanaan dan program antara pusat dan daerah melalui Konreg sangat penting.

Sejauh ini peran BPIW sangat baik dalam melakukan perencanaan dan mempersiapkan Konreg. Hasil dari Konreg disusun untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Kondisi beberapa daerah yang mengalami bencana alam beberapa waktu lalu, menjadi sorotan Menteri PUPR. Beliau mengamanatkan agar dalam membuat perencanaan, harus mengenali dan memahami potensi bencana di lokasi pembangunan infrastruktur dengan melihat dari segi kondisi ekologis lingkungan, cuaca dan iklim, geologi, peta zona rawan bencana, dan mitigasi bencana.

Arahan lainnya adalah perlu dilakukannya optimalisasi pengawasan dan pengendalian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Seluruh proses pembangunan infrastruktur tersebut harus dilakukan tanpa praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bila terjadi pelanggaran dan praktek KKN maka akan ditindak tegas.

Untuk itu kita harus fokus dalam menyelesaikan tugas secara tuntas terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat bermanfaat secara optimal bagi masyarakat. Fokus kita juga terkait Pelaksanaan Tugas Khusus seperti Program Strategis Nasional, Penanganan Bencana, Pasar, Sekolah, dan Rumah Sakit. Terkait hal itu, maka sangat diperlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektoral. Terkait mitigasi risiko perlu dilakukan koordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan daerah.

Disamping kita merencanakan program tahun depan, maka program lima tahun terakhir pada tahun ini, harus dilaksanakan dengan baik, agar target-target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dapat tercapai.

# Sejarah Pelaksanaan Konsultasi Regional

## Filosofi Konreg

Konsultasi Regional (Konreg) bukanlah semata-mata acara seremonial tahunan bidang pemrograman. Konreg menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan pembangunan Infrastruktur PUPR berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi setidaknya lima hal pokok, yaitu tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, adaptif lingkungan, dan akseptabel sosial.

Pentingnya proses perencanaan dan pemrograman digambarkan seperti kata-kata bijak berikut ini: *If we fail to plan, we plan to fail*, jika kita gagal merencanakan, itu artinya kita merencanakan kegagalan. Demikian pula *the law of few* menyatakan bahwa setiap keberhasilan besar selalu dimulai dari sedikit orang dan keberhasilan perencanaan serta pemrograman pembangunan adalah 80 persen keberhasilan dari pembangunan itu sendiri. Prinsip ini dikenal sebagai *pareto optimum*.

Dari prinsip dasar dan filosofi konreg inilah selama belasan bahkan puluhan tahun Kementerian PUPR secara berkelanjutan memperbaiki dan meningkatkan kualitas Infrastruktur PUPR dalam upayanya melayani masyarakat. Proses perencanaan, penyiapan program dan penyusunan anggaran yang dikelola secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Konreg yang dilaksanakan Kementerian PUPR adalah forum koordinasi dan sinkronisasi program tahunan sebagai salah satu tahapan penyiapan program yang diselenggarakan guna mensinergikan sumber daya pembangunan Bidang PUPR yang dimiliki Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah yang merupakan tahapan untuk melakukan konsolidasi

program tahun t+1 antara Direktorat Jenderal dengan Pemerintah Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor.

## Sejarah Konreg

Secara legal, konsultasi regional atau yang disingkat Konreg dilaksanakan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Sungguhpun demikian, proses sinkronisasi program bagi Kementerian PUPR bukanlah hal yang baru. Sebelum Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disahkan, Kementerian PUPR sudah melaksanakan proses penyusunan rencana dan program pembangunan Infrastruktur sektor PUPR.

Hal ini sesuai dengan kaidah dan persyaratan yang ditetapkan oleh UU 25/2004 tersebut, yaitu: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra)-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung



Pelaksanaan Konreg Kementerian PU tahun 2011

Sumber: PU

oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja KL yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat inilah yang dalam rangkaian proses perencanaan dan pemrograman di Kementerian PUPR dikenal dengan istilah Konsultasi Regional.

Jejak digital dalam situs Departemen Perumahan dan Pengembangan Wilayah (d.h. Departemen PU), menunjukkan bahwa pada 28 Juli tahun 2000, Menteri Perumahan dan Pengembangan Wilayah, Ir. Erna Witoelar memberikan sambutan tertulisnya pada acara pembukaan Konsultasi Regional (Konreg) Departemen Kimbangwil yang dibacakan Dirjen Pengembangan Perkotaan Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahyati.<sup>1</sup>

Bahkan, jauh sebelum Departemen Kimbangwil dibentuk oleh Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid, tradisi Konreg sudah diadakan oleh para Menteri PU di era Presiden Soeharto.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa istilah konsultasi regional dipopulerkan pada masa Menteri PU Radinal Muchtar. Walaupun demikian, proses perencanaan dan pemrograman yang partisipatif telah dilaksanakan oleh para Menteri PU sebelumnya dengan istilah yang berbeda.

1. <https://www.pu.go.id/berita/view/4505/rapat-konsultasi-regional>

## Perkembangan Konreg dari Masa ke Masa

Sejak awal Konreg dilaksanakan, prinsip partisipasi para pemangku kepentingan telah diakomodasi. Baik unsur Pemerintah di daerah seperti Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian PU, unsur Pemerintah Daerah seperti BAPPEDA, Dinas PU, termasuk Kementerian/Lembaga dan Dinas terkait lainnya yang berhubungan erat dengan proyek yang akan dibangun di suatu kawasan.

Pelaksanaan Konreg yang partisipatif ini bukan saja menjadi semacam standar prosedur pelaksanaan (SOP), tapi bahkan menjadi semacam **tradisi** dan **krede** dalam penyusunan rencana dan program di Kementerian PU, Departemen Kimbangwil, Departemen Kimpraswil, Departemen PU, sampai dengan Kementerian PUPR saat ini.

Lalu apa yang membedakan Konreg pada beberapa periode sebelumnya dengan Konreg di Era Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Basuki Hadimulyono? Kalau Konreg sebelumnya lebih fokus pada perencanaan dan pemrograman masing-masing sektor, yaitu sumber daya air (SDA), jalan jembatan (Bina Marga), Infrastruktur permukiman (Cipta Karya), dan perumahan (Ditjen PnP) tanpa terlalu memperhatikan sektor lainnya. Maka, pada Konreg saat ini, masing-masing sektor wajib berinteraksi dengan sektor lainnya untuk membuat keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam mengembangkan kawasan tertentu. Setiap kawasan strategis di level nasional

memiliki tema tersendiri, contoh Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang bertema pariwisata, Kawasan Kendal Utara yang bertema Kawasan Industri, termasuk kawasan-kawasan lainnya seperti pelabuhan, bandara, pelabuhan perikanan, kota baru dan seterusnya.

Dalam koridor mendukung kawasan tematik tersebut, semua Infrastruktur PUPR didorong untuk memfungsikan kawasan dengan optimal di bawah arahan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).

Program-program pembangunan baru (*new development*) disiapkan oleh BPIW melalui serangkaian kajian *master plan* dan *development plan* wilayah pengembangan strategis dan kawasan strategis nasional yang selanjutnya disusun menjadi program jangka menengah lima tahunan, kemudian dipertajam lagi menjadi program jangka pendek tiga tahunan, dan terakhir difinalkan sebagai program tahunan. Program tahunan inilah yang kemudian dibawa dalam forum Konreg untuk dibahas bersama dengan para *stakeholders* terkait.

#### What Next?

Selain konsep keterpaduan pengembangan kawasan dengan Infrastruktur PUPR. Konreg gaya baru juga memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pemrograman. Pada periode sebelumnya (tahun 2015 dan sebelumnya), pemanfaatan sistem informasi belum dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), saat itu masih menggunakan excel secara manual.

Hal ini mengakibatkan upaya penerpaduan program pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR dalam setiap Prakonreg belum dapat dilakukan secara optimal dan memakan waktu cukup lama mengingat data base program yang dikelola lebih dari 100 ribu entri data. Awal tahun 2016 digagas konsep pemrograman keterpaduan pengembangan kawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi

dalam bentuk Sistem Informasi Pemrograman (SIPro). Pemanfaatan SIPro terus dikembangkan secara berkelanjutan dan diarahkan untuk memberikan skala prioritas dan bobot keterpaduan masing-masing program agar memudahkan dalam menentukan skala prioritas program.

Dalam perkembangan terakhir, Konreg telah dirancang dan diuji-cobakan dengan menggunakan metode *on line*, yaitu *video conference*. Metode ini diyakini dapat menghemat biaya Konreg tatap muka yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 40 miliar menjadi hanya sekitar Rp 10 miliar. Selain menghemat anggaran, yang lebih penting lagi adalah waktu dari para pejabat terkait tidak terlalu banyak tersita untuk perjalanan dinas dalam rangka Konreg tatap muka.

Walaupun demikian, Konreg dengan metode *video conference* juga memiliki kekurangan dan kelemahan seperti diskusi untuk suatu program tertentu tidak dapat dilakukan secara mendalam dan detail.

Ke depan, kita berusaha agar kelemahan dan kekurangan tersebut dapat ditutup dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Sehingga harapan kita setiap rupiah anggaran Kementerian PUPR dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Semoga!. (Doedoeng Zenal Arifin)



Konreg 2019 dengan teknologi Video Conference

Sumber: BPIW



Ir.H.Nova Iriansyah.M.T.  
Plt. Gubernur Aceh

## Aceh Sangat Membutuhkan Dukungan Infrastruktur Sektor PUPR

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kebijakan dari Presiden adalah pembangunan infrastruktur secara masif. Selain itu Pemerintah juga sedang membangun sumber daya manusia (SDM) agar bisa mandiri setelah manfaat infrastruktur itu bisa kita rasakan.

Secara umum perekonomian di Aceh menunjukkan perkembangan yang baik. Indikator ekonomi Aceh seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, inflasi, dan indeks gini rasio mengalami tren yang positif, meski angka absolutnya belum terlalu menggemirakan.

Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi di Serambi Mekkah ini secara kumulatif mencapai 4,61 persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, walaupun masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Bila dilihat dari potensi di Pulau Sumatera, Provinsi Aceh tidak sekedar menjadi pusat pengembangan lumbung pangan nasional, tapi juga industri hilir, pertambangan mineral, aspal, panas bumi, minyak dan gas bumi, serta pariwisata khususnya ekowisata.

Oleh karenanya banyak yang harus dikerjakan, mengingat pembangunan di Aceh masih sedikit tertinggal dari provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Namun kini Aceh merupakan bagian strategis pengembangan Pulau Sumatera,

terutama dengan adanya Kawasan Strategis Nasional seperti Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang, Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Arun-Lhouksumawe.

Dalam mencapai peningkatan investasi dan daya saing ekonomi yang berbasis kewilayahan, kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Kementerian PUPR terutama dalam hal konektivitas antar kawasan strategis.

Informasi terkait dukungan yang disajikan BPIW sangat informatif, sehingga kami bisa memahaminya dengan baik dan kemudian menyesuaikan perkembangan program di daerah dengan perkembangan program dan kebijakan dari Kementerian PUPR.

Tidak hanya masalah konektivitas seperti pembangunan jalan dan jembatan, kami juga berharap Kementerian PUPR membantu dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesehatan masyarakat, akses masyarakat terhadap rumah layak huni, serta pembinaan dan peningkatan SDM.

Dukungan Kementerian PUPR tentunya akan berdampak pada peningkatan pembangunan keseluruhan di Aceh dan pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

# Pola Baru Demi Efektifitas dan Efisiensi



**Iwan Nurwanto**

Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi  
Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Kementerian PUPR melalui BPIW kembali menggelar Konsultasi Regional (Konreg) yang merupakan pembahasan program infrastruktur untuk tahun depan. Konreg yang melibatkan *stakeholders* terkait ini dilakukan berbeda, di mana selain tatap muka, juga dilakukan dengan *video conference*. Pola baru tersebut dilakukan demi pelaksanaan konreg yang lebih efektif dan efisien. Berikut wawancara "Buletin Sinergi" dengan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto seputar kegiatan konreg tersebut.

## Apa saja yang sudah dipersiapkan terkait pelaksanaan Konsultasi Regional atau Konreg Kementerian PUPR?

Dari sisi substansi program, kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan konreg. Kita mempersiapkannya melalui pelapisan program jangka pendek tiga tahunan. Kemudian kita pertajam dengan melakukan koordinasi dan

konsolidasi dengan unsur-unsur yang ada di daerah seperti dinas pekerjaan umum dan Bappeda. Selain itu dengan unit organisasi atau unsur Kementerian PUPR yang ada di daerah, seperti balai-balai dan satuan kerja atau satker. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesiapan dari program jangka pendek.

kemudian setelah itu kita melakukan penajaman lagi dengan unsur-unsur

dari Direktorat Jenderal, baik Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya maupun Perumahan. Penajaman dilakukan pada *pra desk* atau sebelum rapat *desk*. Kegiatan *pra desk* ini kita lakukan di awal bulan Januari. Dengan demikian, pada saat memasuki konreg, kita sudah memiliki program-program yang tajam dengan data-data persiapan yang baik. Dari sisi substansi kita sudah cukup intensif melakukan persiapan program-program apa yang dibahas dalam konreg kali ini.

## Apa perbedaan yang signifikan pelaksanaan konreg tahun ini dibanding tahun sebelumnya?

Dari sisi substansi kita melakukan proses yang lebih intensif dari tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi pelaksanaan, tahun ini kita melakukan uji coba konreg melalui *video conference*. Jadi dialog dilakukan antara Kementerian PUPR yang ada di *ICT Room* dengan empat provinsi melalui *video conference* secara bergantian. Masing-masing

provinsi dilakukan koordinasi dan sinkronisasi program selama dua hari.

Keempat provinsi tersebut yakni Provinsi Kalimantan Selatan mewakili wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Utara yang mewakili wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara yang mewakili wilayah Sumatera dan Provinsi Jawa Timur yang mewakili wilayah Jawa dan Bali ini.

Dari langkah-langkah tersebut kita berharap tahun depan konreg bisa dilakukan melalui *video conference* secara keseluruhan atau paling tidak porsi untuk *video conference* lebih banyak ketimbang tatap muka. Tahun depan kita kemungkinan lihat kembali pola konreg akan seperti apa, apakah kita akan siap melakukan *video conference* untuk 34 provinsi atau kita cari pola yang lebih efektif lagi. Pada intinya dari tahun ke tahun, konreg ini diharapkan makin efisien dan efektif dari sisi pelaksanaannya maupun *output*.

*"Dari sisi substansi program, kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan konreg. Kita mempersiapkannya melalui pelapisan program jangka pendek tiga tahunan. Kemudian kita pertajam dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi"*



Sumber: Dok. BPIW

Konreg kini juga dilakukan melalui *video conference*

"Kita berharap tahun depan konreg bisa dilakukan melalui video conference secara keseluruhan atau paling tidak porsi untuk video conference lebih banyak ketimbang tatap muka. Tahun depan kita kemungkinan lihat kembali pola konreg akan seperti apa"

**Apakah dengan melakukan video conference justru menambah biaya?**

Tidak demikian, karena fasilitas untuk video conference sudah menggunakan fasilitas yang ada, dan kita sudah kerja sama dengan Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kementerian PUPR. Selain itu kita juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di balai-balai yang ada di daerah. Jadi kalau dari sisi peralatan tidak menggunakan anggaran yang besar.

Namun memang dengan video conference waktunya lebih panjang. Jadi kalau saat ini, satu provinsi pembahasan melalui video conference mencapai dua hari, maka berarti kalau 34 provinsi pembahasan program melalui video conference tersebut membutuhkan waktu selama 68 hari. Itu kalau fasilitas ICT room-nya hanya satu.

Tapi kalau tahun depan kita bisa menggunakan dua ICT room, demikian juga di daerahnya, maka waktunya bisa mencapai kurang lebih selama satu bulan melakukan pembahasan program melalui video conference.

**Apa tantangannya menggunakan video conference untuk pembahasan program infrastruktur PUPR?**

Tantangannya dari segi kebiasaannya saja. Namun kita tidak akan menghilangkan begitu saja pembahasan program infrastruktur dengan cara tatap muka, karena konsultasi dengan tatap muka masih sangat diperlukan. Bisa saja nanti pelaksanaan konreg dilakukan tatap muka satu kali yang berisi arahan para pimpinan. Kemudian selanjutnya dilakukan diskusi menggunakan fasilitas video conference. Cita-cita kami kedepan adalah konreg dilakukan secara online. Hal itu memang masuk dalam timeline

pengembangan model konreg di BPIW.

**Bila konreg dilakukan secara online, bagaimana kesiapan sumber daya manusia atau SDM yang ada?**

Harus disiapkan secara matang. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan dukungan seluruh unit kerja di BPIW dan juga diperlukan dukungan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR. Hal ini untuk meningkatkan SDM di BPIW khususnya dalam mempersiapkan kegiatan konreg.

**Apa yang diharapkan dari pembahasan program secara detail melalui rapat di setiap desk di konreg tersebut?**

Setiap pembahasan di desk kita mengharapkan ada satu keluaran terkait dengan program-program yang siap dilaksanakan di tahun 2020. Meskipun belum tentu semua program yang disepakati di setiap desk bisa dilaksanakan, karena tergantung pada kondisi anggaran. Kondisi terkini dari anggaran negara ini memegang peranan yang sangat penting apakah program-program tersebut bisa dieksekusi atau tidak.

Nanti, sekitar bulan Juli setelah turunnya pagu anggaran, kita akan melakukan penajaman hasil konreg. Penajaman akan dilakukan BPIW dan Biro Perencanaan. Selain itu juga melibatkan Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.

Sehingga diharapkan nanti, muncul program-program yang memang betul-betul siap dilaksanakan dan sesuai dengan keadaan atau alokasi pagu anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

**Untuk program-program yang masuk baseline, apakah program-program tersebut merupakan program dari**



Suasana diskusi Konreg di Mataram.

Sumber: Dok. BPIW

**kegiatan daerah atau program nasional?**

Pada saat kita menyusun basis program untuk pembahasan konreg, kita juga mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan dan keuangan yang dikeluarkan BPIW. Tapi kita juga menampung program-program yang berkualitas yang muncul dari sektoral dan juga dari daerah.

Artinya program yang keluar dalam baseline adalah program yang memang dari semua sisi adalah program prioritas. Baik dipandang dari sisi Kementerian PUPR maupun dari sisi pemerintah daerah. Kementerian PUPR memikirkan kepentingan yang lebih besar seperti kepentingan pengembangan wilayah dan kepentingan nasional. Pemerintah daerah juga mempunyai program-program prioritas untuk pengembangan daerahnya masing-masing. Tentunya program-program prioritas tersebut dalam ruang lingkup kewenangan pemerintah pusat.

**Bagaimana menurut Bapak jalannya konreg hingga saat ini?**

Konreg ini merupakan suatu proses yang sudah berjalan sekian bulan, dan dilakukan dengan koordinasi bersama, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan sektoral. Kalau saya melihat dari tahun ke

tahun koordinasinya sudah jauh lebih baik. Artinya kita semua sudah bisa saling memahami kemana arah pembangunan infrastruktur sektor PUPR untuk tahun 2020.

Jadi bukan lagi kepentingan BPIW, sektoral maupun kepentingan daerah, tapi kepentingan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Sudah menjadi kesepakatan bahwa program infrastruktur yang bisa dilaksanakan adalah program infrastruktur yang prioritas dan strategis.

**Apa harapan Bapak kedepan dari pelaksanaan konreg ini?**

Kita tentunya berharap, kedepan, pelaksanaan konreg jauh lebih baik. Kemudian program-program yang dibahas di konreg betul-betul bisa diimplementasikan sesuai dengan harapan. Kita juga berharap usulan-usulan program yang prioritas di konreg ini bisa terpenuhi terutama dari sisi anggaran. Kita harus realistis, karena kondisi anggaran belum bisa kita pastikan jumlah. Tapi kita berharap program yang kita hasilkan dari konreg ini, bisa dieksekusi atau dilaksanakan di tahun 2020. **(Hendra/Indira/Ajeng)**

"Kita tentunya berharap, kedepan, pelaksanaan konreg jauh lebih baik. Kemudian program-program yang dibahas di konreg betul-betul bisa diimplementasikan sesuai dengan harapan. Kita juga berharap usulan-usulan program yang prioritas di konreg ini bisa terpenuhi terutama dari sisi anggaran".

Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu

# Raja Ampat "Global Ecotourism"

Sektor pariwisata seperti di Raja Ampat, menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Pembangunan pariwisata mempunyai peranan penting karena disamping sebagai penggerak perekonomian juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.



Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang RencanaInduk Pengembangan Kepariwisata Nasional telah menetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).

Di dalam konsep WPS, yang diharapkan dapat menjadi *engine of growth* adalah KSPN yang memiliki tipologi kawasan pariwisata pantai, atau dapat disebut sebagai kawasan strategis pariwisata pantai. Meskipun Raja Ampat tidak termasuk dari 10 KSPN Prioritas, KSPN Raja Ampat merupakan salah satu dari 25 KSPN prioritas yang tercantum di dalam RPJMN. KSPN Raja Ampat tersohor akan keindahan alam bawah lautnya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di internasional.

KSPN Raja Ampat merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat, serta terintegrasi dengan KPPN Waigeo dan KPPN Sorong. Dari area tersebut, fokus pemrograman

tidak diarahkan ke KSPN Raja Ampat di Misool, melainkan ke KPPN Waigeo. Hal ini disebabkan jumlah DTW, kecenderungan wisatawan berkunjung, serta kesiapan infrastruktur pada KPPN Waigeo lebih memungkinkan area ini untuk ditangani dibandingkan dengan KSPN di Misool.

Selain itu, akses dari "Regional Hub" di Sorong menuju Misool terlalu jauh, sehingga pemilihan area fokus pemrograman pada KPPN Waigeo dirasa lebih efektif terkait penanganan pariwisata di Raja Ampat. Meski demikian, kawasan pemrograman tidak hanya terbatas pada area Waigeo tersebut, melainkan juga meliputi regional *support*-nya. Pemrograman untuk regional *support* meliputi konektivitas antara KPPN Waigeo dengan Perkotaan Sorong dan Misool. Hal ini dimaksudkan agar pemrograman nantinya tidak hanya meliputi internal kawasan, melainkan juga eksternalitas yang terkait, yang dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja kawasan.

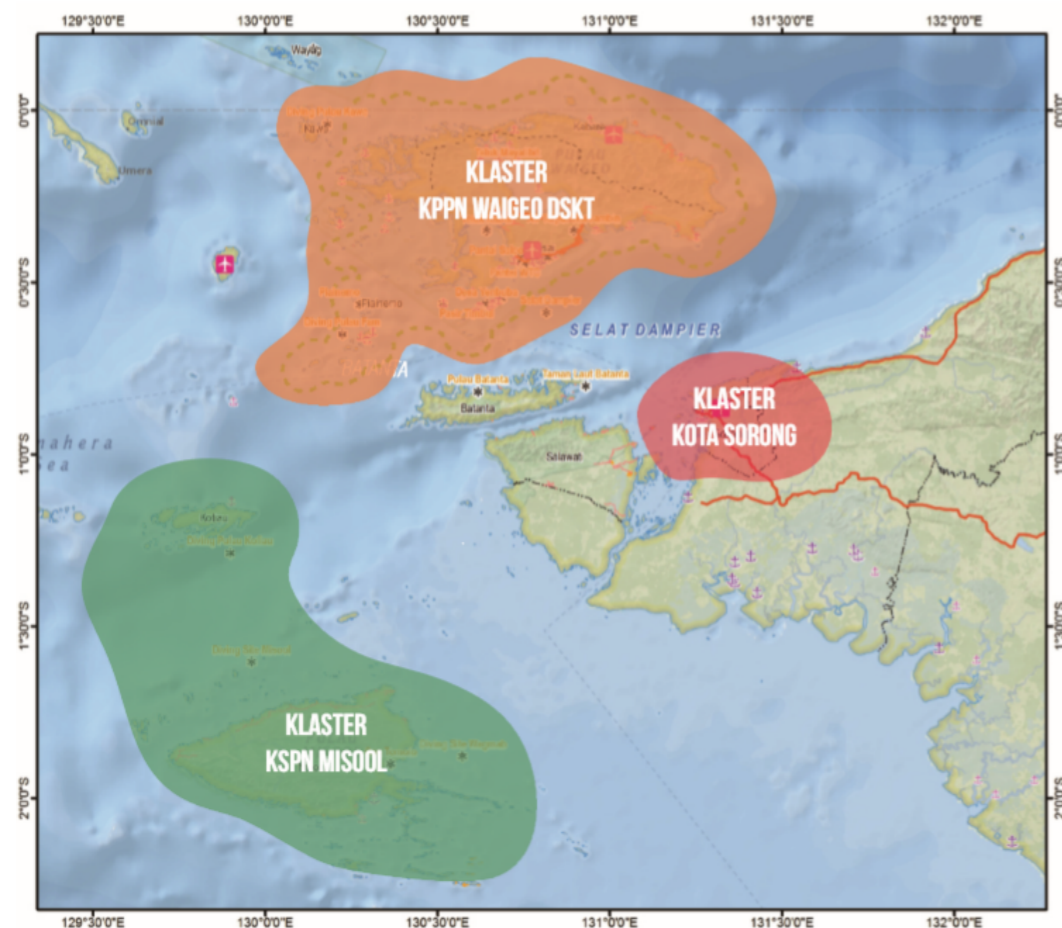
## Delineasi Kawasan Fokus Pemrograman dan Regional Support

Lokasi kawasan pengembangan pariwisata pantai KPPN Waigeo, Raja Ampat memiliki target market potensial dari Kota-Kota Besar yang ada di Indonesia, terlebih yang memiliki bandara dengan rute penerbangan menuju Kota Sorong.

The map shows the following zones and locations:

- DPN Raja Ampat** (Green oval)
- KPPN Waigeo dskt** (Blue oval)
- KPPN Sorong dskt** (Blue oval)
- KSPN Raja Ampat dskt** (Red oval)
- Waisai** (Location on Waigeo Island)
- Sorong** (Location on Sorong Island)
- Atmas** (Location on Sorong Island)
- Weyer** (Location on Misool Island)
- Diving P. Wayang, P. Kawe, P. Ayui Bay, P. Waisai, P. Fam** (List of diving sites)
- Wisata Pulau-pulau Kecil** (Small Island Tourism)
- Taman Laut Selat Dampier** (Dampier Strait Marine Park)
- Wisata Pulau Batanta** (Batanta Island Tourism)
- Taman Laut Batanta** (Batanta Marine Park)
- Diving P. Nofiau, Diving Site Misool, Diving Site Wagnab, Goa Tomelo** (List of diving sites and caves)

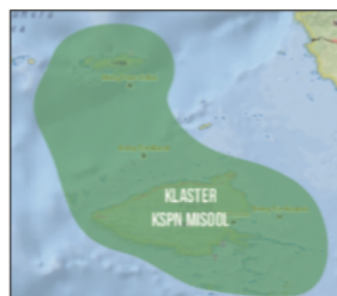




Kawasan Pemrograman Regional Support: Kota Sorong (Hub)



Kawasan Fokus Pemrograman Utama: Waigeo dan sekitarnya

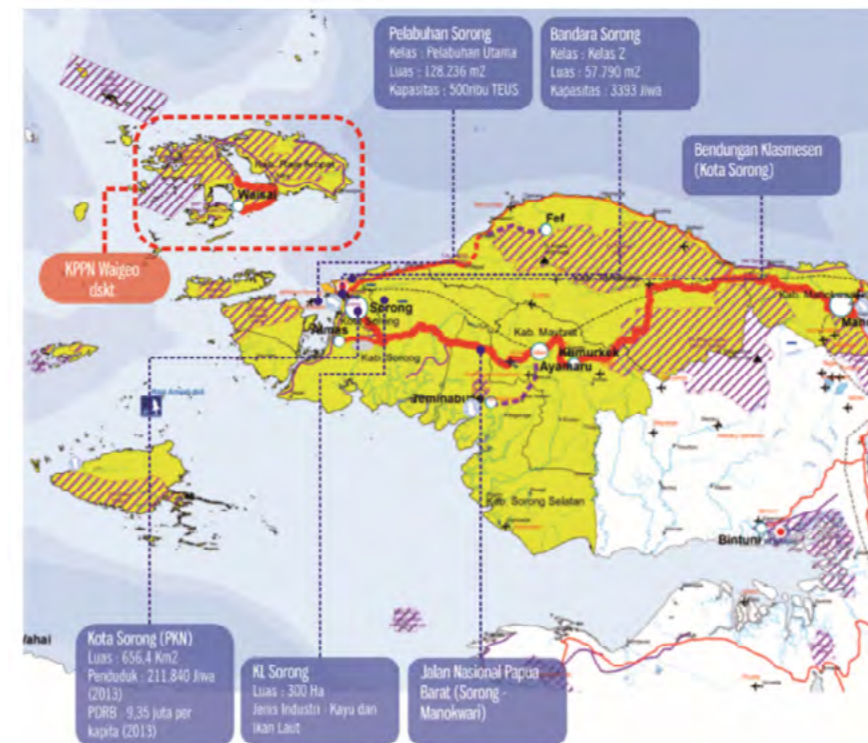


Kawasan Pemrograman Regional Support: Misool dan sekitarnya

Beberapa kota besar yang memiliki penduduk cukup potensial sebagai target wisatawan Raja Ampat antara lain adalah Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Manado, Ambon, dan Sorong. Tingginya biaya wisata di KPPN Waigeo membuat segmentasi wisatawan lokal yang dapat mengakses wisata tersebut setidaknya merupakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi kelas menengah ke atas dari kotakota yang potensial sebagai target market wisatawan tersebut.

Selain itu Raja Ampat secara keseluruhan memiliki potensi pasar wisatawan asing yang cukup besar (sekitar 79 persen wisatawan yang datang merupakan wisatawan asing).

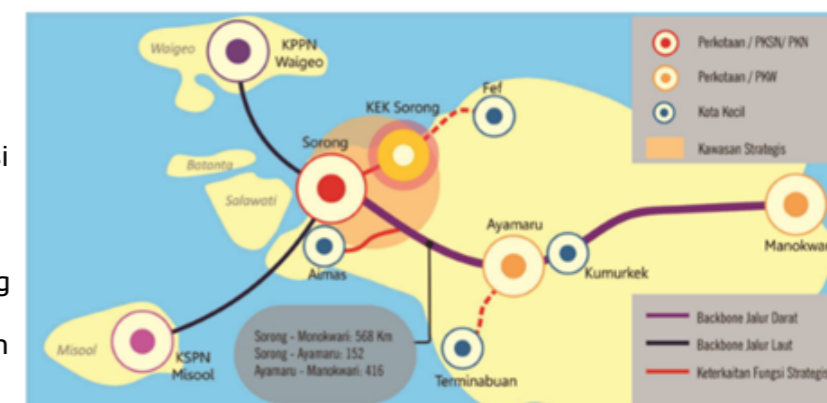
Potensi dan kekayaan alam Raja Ampat yang jarang didapatkan di daerah wisata lainnya, menjadikan Raja Ampat sebagai kawasan wisata yang memiliki daya tarik yang cukup besar bagi wisatawan terutama wisatawan dengan minat khusus.



KPPN Waigeo dskt di Raja Ampat adalah bagian dari Pusat Pertumbuhan Baru pada WPS ini dari sektor kepariwisataan, yang berjarak +/- 64 Km dari Kota Sorong. Pusat Pertumbuhan baru memiliki arti bahwa saat ini *backbone* perekonomian koridor tersebut belum berkembang dan belum berfungsi secara maksimal untuk itu perkembangan kawasan memerlukan stimulan dan penguatan konektivitas untuk mempercepat kemajuan perekonomian pada WPS ini.

Peran KPPN Waigeo dskt dalam pengembangan WPS Sorong – Manokwari adalah sebagai salah satu titik perkembangan wilayah yang berbasis pada kepariwisataan yang diharapkan dapat menjadi titik pertumbuhan utama yang memberikan *trickle down effect* pada wilayah sekitarnya.

Begitu pula sebaliknya, pengembangan infrastruktur WPS Sorong – Manokwari juga memiliki andil untuk mendorong KPPN Waigeo sebagai pusat pertumbuhan baru. Posisi KPPN Waigeo dskt yang berada dekat dengan Pusat Kegiatan Nasional di Kota Sorong diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan yang terdiri atas kepulauan dan bertumpu pada hasil produksi sektor kelautan dan pariwisata. WPS Sorong - Manokwari saat ini sudah didukung dengan

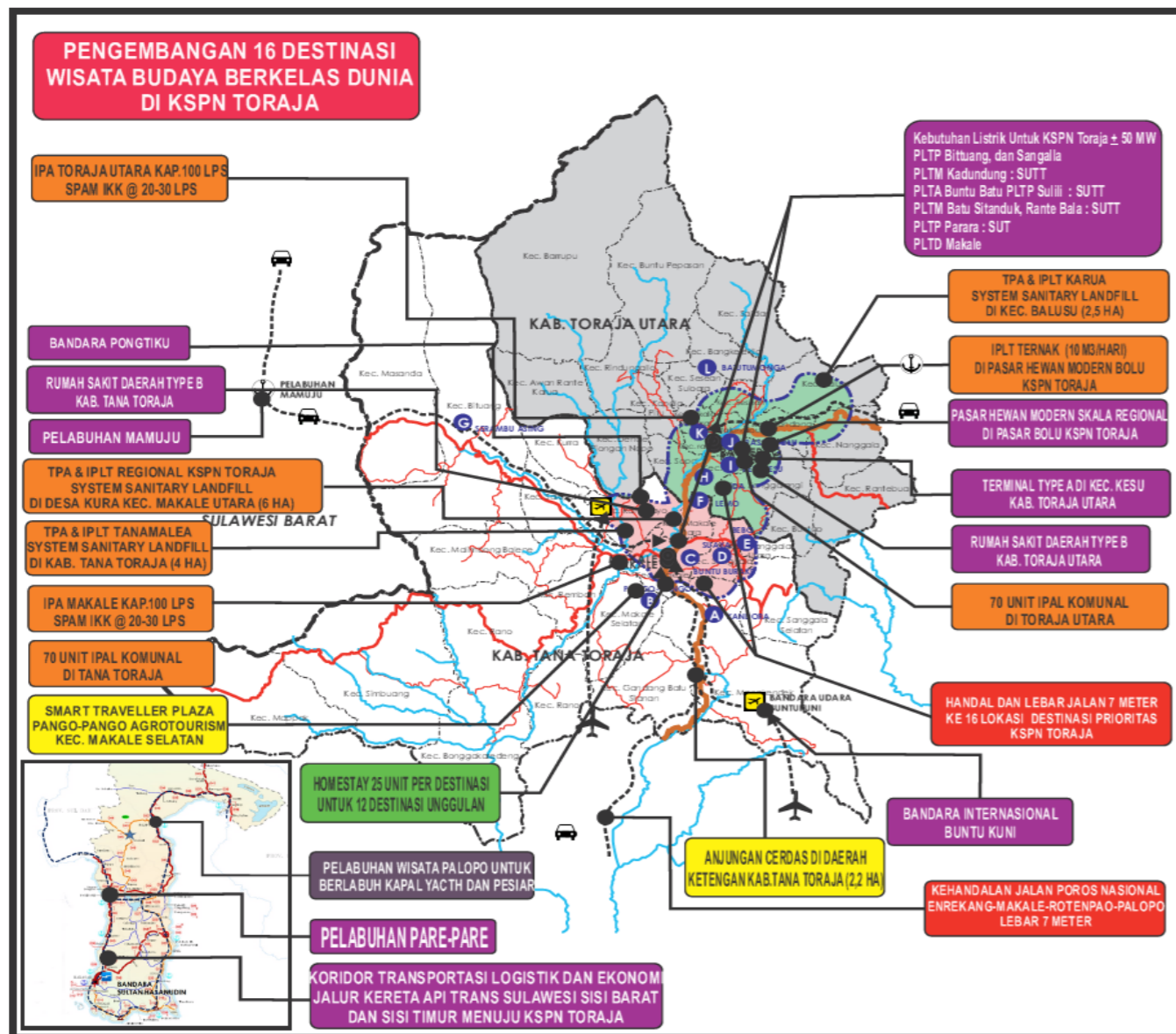


POSISI KAWASAN PARIWISATA RAJA AMPAT TERHADAP WPS

Raja Ampat dskt merupakan bagian dari WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sorong – Manokwari, yang terhubung oleh Jalan Nasional Papua Barat. Backbone pertumbuhan WPS Sorong - Manokwari disokong dengan beberapa pusat pertumbuhan ekonomi diantaranya Kawasan Strategis dalam bidang ekonomi yaitu Kawasan Andalan Sorong, rencana KEK Sorong, kawasan perkembangan pariwisata KPPN Waigeo dskt, PKN Sorong, PKW Ayamaru, serta PKW Monokwari.

beberapa infrastruktur yang dapat mendorong terjadinya perkembangan ekonomi yang lebih pesat. Salah satunya terdapat dukungan aksesibilitas dengan adanya simpul transportasi utama di Kota Sorong yaitu Pelabuhan Sorong dengan kapasitas 500.000 TEUS dan Bandara Domine Uduard Osok dengan kapasitas 3.393 Jiwa.

Selain transportasi laut dan udara WPS Sorong – Manokwari juga didukung dengan adanya jaringan Jalan Nasional Papua Barat yang menghubungkan Sorong dengan Manokwari sepanjang 568 Km yang melewati Perkotaan Ayamaru (Sorong - Ayamaru: +/- 152 Km; Ayamaru - Sorong: +/-416 Km). Simpul transportasi utama tersebut juga merupakan *entry point* untuk menuju KPPN Waigeo dskt. Dengan demikian, Kota Sorong sebagai PKN



Pembangunan infrastruktur PUPR di KSPN Tana Toraja dilakukan dengan memadukan antara pengembangan wilayah dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional.

Hal ini juga termasuk penyediaan kebutuhan dasar konektivitas pengembangan wilayah. Pengembangan infrastruktur PUPR fokus dalam mendukung pengembangan pariwisata ditujukan untuk memberikan nilai tambah bagi kawasan destinasi wisata.

Untuk itu diperlukan sinergitas dalam perencanaan infrastruktur PUPR dengan Pemerintah Daerah, antara lain khususnya ketersediaan lahan (*clean and clear*), program-program infrastruktur jalan daerah dan pembangunan obyek wisata.

Hal itu untuk memaksimalkan potensi kekayaan pariwisata budaya dan pegunungan di KSPN Toraja dan memajukan sektor pariwisata Indonesia. (Alis/Farhan)

## Jurnal Ilmiah

Rubrik ini memuat rangkuman artikel ilmiah bidang pengembangan wilayah dan yang berkaitan. Artikel yang diulas dalam rubrik ini adalah yang telah terbit dalam jurnal ilmiah nasional/internasional. Untuk mendapatkan artikel asli, pembaca dapat menghubungi redaksi.

# Manajemen Regenerasi dan Konservasi Kota di Cina: Studi Kasus Shanghai

Jiantao Zhang<sup>1</sup>

*P*aper ini ditujukan untuk membangun kerangka metodologis dalam kajian manajemen regenerasi dan konservasi kota di Cina, juga untuk mengevaluasi praktik saat ini. Shanghai dipilih sebagai lokasi studi kasus karena telah mengalami konservasi kota skala besar dan regenerasi yg cukup maju.

*Pertumbuhan sosial ekonomi yang cukup pesat, dan regenerasi kota yang besar, telah membuat china cukup tertekan sisi tradisional dan budayanya. Oleh karena itu Cina membuat sistem konservasi kota pada akhir 1980an. Namun demikian, kerangka kebijakan nasional ini belum lengkap sedangkan praktik konservasi sangat beragam sesuai kewenangan lokal masing-masing. Keseimbangan antara regenerasi dan konservasi kota menjadi hal yang berat bagi Cina.*

### Latar Belakang

Berdasarkan beberapa studi, Pemerintah daerah di Cina kekurangan kebijakan dan payung

hukum untuk mengontrol perubahan-perubahan besar yg terjadi di perkotaan di Cina. Selain itu mereka juga kekurangan perencanaan dan pendanaan. Sementara Cina sendiri menghadapi pertumbuhan sosial ekonomi yang sangat cepat.

Padahal menurut *Urban Plan Making Regulations* (Kementerian Pembangunan 1991), pemerintah daerah harus membuat perencanaan pengawasan lokal yang detail yang menjadi dasar sistem zonasi dalam mengelola area perkotaan. Beberapa kota seperti Beijing, Shanghai, dan Suzhou telah mengadopsi sistem zonasi ini. Sedangkan Nanjing, Wuhan, dan Louyang mengadopsi sistem kebijakan Perencanaan lokal yang komprehensif. Namun usaha-usaha ini nampaknya masih belum efektif.

Shanghai adalah pusat ekonomi dan pelabuhan terbesar Cina yang menyumbang 1/8 dari pendapatan keuangan nasional dan 1/4 dari total ekspor negara. Shanghai juga merupakan pusat budaya penting di Cina dan warisan yang dibangun di Shanghai berasal

dari sejarah modern Tiongkok yang merupakan salah satu dari 99 Kota Budaya Bersejarah Nasional di Cina. Oleh karena itu, Shanghai dipilih menjadi lokus dalam penelitian ini. Artikel ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah mengembangkan kerangka kerja metodologis untuk studi manajemen regenerasi dan konservasi perkotaan di Cina. Yang kedua adalah menerapkan kerangka kerja untuk praktik manajemen dan mengevaluasi praktik ini

**Kerangka Teori**

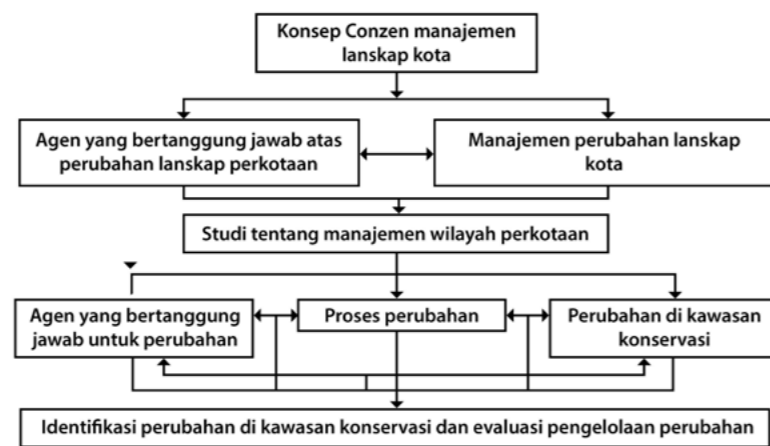
Ide Conzen tentang manajemen lanskap kota dikembangkan oleh beberapa peneliti *Urban Research Group Morphology* menjadi dua jalur penelitian. Jalur pertama meneliti agen yang bertanggung jawab untuk perubahan lanskap perkotaan, dan jalur lainnya mengeksplorasi peran perencanaan publik dalam pengelolaan perubahan tersebut.

Kedua bagian tersebut saling terkait erat dan memperkuat konsep manajemen lanskap kota Conzen (Whitehand 1992: 3). Prinsip Conzenian menyatakan bahwa lanskap kota akan mewakili akumulasi pengalaman generasi selanjutnya. Di sini, pemandangan kota adalah gambaran tentang masyarakat yang menciptakannya karena mereka adalah artefak dan pola fisik tertentu yang merupakan bagian dari geografi sosial (Whitehand 1992: 2).

Fokus studi manajemen lanskap kota meliputi agen penanggung jawab, kebijakan perencanaan, dan interaksi timbal balik antar keduanya dalam proses perubahan. Dalam proses perubahan ini, termasuk pengambilan keputusan yang terjadi, juga diselidiki dan dievaluasi. Jenis studi ini memberikan pemahaman mendasar tentang evolusi perubahan lanskap perkotaan dan masyarakat serta

kegiatan yang menciptakan perubahan tersebut. Metode utama yang digunakan dalam jenis studi ini adalah studi kasus terperinci dan unit analisisnya adalah perubahan individu. Sumber data utama berasal dari otoritas perencanaan lokal, termasuk aplikasi perencanaan dan aplikasi bangunan. Sedangkan data pelengkap berasal dari korespondensi dan wawancara dengan berbagai agen.

Dalam konsep manajemen lanskap kota, studi regenerasi dan konservasi perkotaan difokuskan pada perubahan di wilayah perkotaan, pada agen yang bertanggung



jawab atas perubahan dan pada proses perubahan (Gambar 1).

Gambar 1: Kerangka Penelitian

**Metode Penelitian**

Yin (1994:1) menyarankan lima jenis strategi penelitian yaitu eksperimen, survey, analisis arsip, sejarah, dan studi kasus. Kelima strategi tersebut tergantung pada tiga kondisi, yaitu:

- (i) Jenis pertanyaan penelitian;
- (ii) Ada atau tidaknya kontrol peneliti atas kejadian perilaku aktual; dan,
- (iii) Fokusnya pada fenomena kontemporer atau historis

Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah "bagaimana kerangka kerja yang diusulkan dapat diterapkan pada studi tentang definisi dan pengelolaan

regenerasi dan konservasi perkotaan Cina?". Secara umum, penelitian studi kasus dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, studi kasus tunggal dan studi kasus ganda.

Shanghai memiliki 11 kawasan konservasi. Daerah-daerah tersebut memiliki berbagai jenis bentuk dan karakter perkotaan dan telah mengalami berbagai tekanan pembangunan. Oleh karena itu, mengingat kasus-kasus yang dipelajari dalam penelitian sebelumnya, maka studi kasus ganda adalah pilihan yang lebih disukai untuk penelitian ini. Dua kawasan konservasi Shanghai, yang mewakili berbagai jenis kawasan perkotaan di Shanghai, akhirnya dipilih sebagai wilayah studi kasus untuk penelitian ini. Sedangkan metode utama yang digunakan dalam bagian penelitian ini adalah wawancara dan analisis dokumen.

**Studi Kasus Si Nan Conservation Area (SNCA)**

Ada dua proyek SNCA yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu pembangunan gedung komersial Central Plaza, dan penggantian deretan rumah Li-Long modern. Pembangunan gedung Central Plaza dilaksanakan pada tahun 1990-an dengan melibatkan gedung perkantoran yang tinggi dan pembongkaran sebagian bangunan bersejarah. Meskipun secara peraturan pelestarian bangunan bersejarah, lokasi ini tidak dapat dirubah/diganti dengan bangunan baru, namun pada akhirnya izin pembangunan pun keluar.

Alasannya karena proyek ini adalah proyek investasi perkotaan luar negeri berskala besar pertama di Distrik Luwan. Namun tetap ada persyaratan khusus yang ditetapkan oleh petugas di antaranya pembangunan baru tidak menyentuh bangunan bersejarah, yang fasadnya harus dilestarikan secara utuh. Akhirnya gedung itu dibangun sebagai latar belakang gedung bersejarah,

diintegrasikan sebagai podium bagi bangunan komersial itu. Pengembang menghabiskan dana lebih besar, yaitu RMB 30 juta untuk itu, sedangkan jika bangunan bersejarah itu dihancurkan,



The central plaza.

pengembang hanya membutuhkan RMB 4 juta.

Kasus ini sangat berharga sebagai pengalaman yang melibatkan koeksistensi bangunan bersejarah dan bangunan baru di kawasan konservasi Shanghai. Namun, setelah perubahan selesai, dekorasi interior bangunan bersejarah juga dimodernisasi dan dengan demikian tidak sesuai dengan gaya penampilan luarnya

Kasus kedua adalah Proyek Regenerasi Area Tai Ping Qiao, yang merupakan contoh pengembangan skala besar di 23 blok dan melibatkan sekelompok bangunan bersejarah. Wilayah Tai Ping Qiao terdiri dari rumah-rumah tua Li-Long yang sudah rusak parah yang pada tahun 1990-an membutuhkan renovasi segera, namun karena ada situs bersejarah yaitu "Situs Kongres Pertama" di dalam blok tersebut, maka proses renovasi harus dilakukan dengan ketat. *Shui On Company* (Pengembang) mengusulkan agar bangunan tempat tinggal yang lama dikonversi menjadi penggunaan komersial. Semua fasad

dan atap serta bahan asli dilestarikan, sementara struktur internal dan dekorasinya diubah. Pengembang juga mengusulkan pembuatan danau besar buatan di tengah area proyek untuk memberikan kesan lanskap yang menyenangkan untuk area tersebut.

Dalam proposalnya, pengembang membagi bagian proyek ini menjadi dua kelompok bangunan, yaitu perumahan lama Li-Long tradisional yang terpelihara termasuk situs Kongres Pertama, dan bangunan-bangunan bergaya modern yang baru. Namun usulan untuk tiga bangunan modern berlantai sembilan harus dikurangi menjadi enam lantai dan menjadi latar belakang bagi Situs Kongres Pertama.

#### Studi Kasus Heng Shan Conservation Area (HSCA)

HSCA lebih besar dari SNCA dan pembangunannya lebih banyak diprakarsai oleh pemerintah dibanding SNCA. Sebagai daerah perumahan tradisional kelas atas, HSCA memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, kontrol otoritas terhadap pembangunan dan perencanaan di daerah tersebut



xianguo hotel

tampak lebih rumit daripada daerah-daerah lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus. Pertama, pembangunan Xingguo Hotel, yang

terletak di bagian barat Jalan Xingguo. Hotel hiburan ini mengalami defisit besar dan butuh tambahan pendapatan sehingga diputuskan untuk membuat bangunan baru bertingkat tinggi. Namun hotel ini memiliki tiga villa yang dilestarikan, dan pasti bertentangan dengan proposal pembangunan bangunan tinggi.

Untuk memenuhi persyaratan pelestarian tiga villa tersebut, petugas perencanaan mewajibkan bangunan baru berada di luar taman yang berisi villa-villa itu. Oleh karena itu satu-satunya tempat yang tersedia adalah di utara taman. Selain itu, bangunan baru harus berjarak minimal 150 meter dari villa. Akhirnya para arsitek dan pekerja bangunan mengikuti syarat-syarat tersebut.

Kasus kedua adalah proyek yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Angkatan Udara. Saat itu dipilih tiga lokasi di Shanghai untuk dikembangkan, yaitu: *Mid Huihai Road*, *Julu Road* dan *Yuqing Road*. Namun lokasi di Yuding Road ditolak dan dua lokasi lainnya disetujui untuk dikembangkan. Situs Hui Hai Road dikembangkan menjadi wisma tamu pribadi.

Mengingat lokasi-lokasi tersebut adalah ruang luas dan hijau, maka ditetapkan beberapa persyaratan dalam pembangunan. Di antaranya ketinggian bangunan tidak boleh lebih dari 24 meter. Kondisi fasad dan gaya bangunan, serta tata letak plot dan lalu lintas, juga ditetapkan secara terperinci untuk mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungannya, walaupun tidak ada kawasan konservasi atau rencana konservasi pada waktu itu.

Kasus ketiga adalah Proyek pengembangan Rumah Sakit Huashan. Rumah Sakit Huashan dibagi menjadi dua blok terpisah, yaitu departemen rawat jalan dan departemen rawat inap. Departemen rawat jalan terletak di depan Shanghai Hotel di blok yang sama, yang menyebabkan ketidaknyamanan

bagi keduanya. Akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan bahwa hotel membayar uang rumah sakit agar berpindah di lokasi yang sama dengan departemen rawat inap, dan hotel akan mendapatkan tanah asli dari departemen rawat jalan. Akhirnya dua buah gedung Rumah Sakit pun dibangun setinggi 18 dan 21 lantai. Dalam kasus ini, petugas perencanaan tidak menetapkan persyaratan khusus pada proposal pembangunan RS kecuali agar pembangunan memenuhi zonasi umum. RS juga harus menjaga jarak yang cukup terhadap jalan yang berada di sebelah selatan mereka, karena lebar jalan yang sangat sempit dibandingkan dengan ketinggian bangunan.

#### Kesimpulan

Dalam paper ini, isu-isu yang diangkat pada kelompok kasus pertama (SNCA) lebih berkaitan pada agen langsung/ pemrakarsa. Motif yang dibawa para pemrakarsa dalam kasus ini, menghasilkan lanskap dan karakter kota yang lebih private-use. Sedangkan kasus kedua (HSCA) lebih menunjukkan pembangunan yang kurang sesuai dengan lanskap yang ada.

Para inisiator lokal lebih banyak memahami dan menjaga lanskap dibanding inisiator dari Asia Tenggara yang kebanyakan berorientasi pada keuntungan. Inisiator asing telah mempengaruhi lanskap kota dan karakter kawasan konservasi Shanghai dengan memperkenalkan elemen asing, bangunan tinggi modern dan perkembangan skala besar yang benar-benar berbeda dari lanskap perkotaan lokal yang ada.

Peran arsitek dalam perubahan lanskap kurang berpengaruh, karena peran mereka berada pada aspek visual. Tidak ada perbedaan yang jelas antara arsitek domestik (terutama lokal) dan arsitek asing dalam pertimbangan mengenai lanskap yang ada yang

dimanifestasikan dalam desain mereka. Isu lainnya berkaitan dengan manajemen otoritas perencanaan lokal, dan kontrol atas, perubahan lanskap perkotaan di kawasan konservasi. Setiap pembangunan tentu meninggalkan jejak pada kawasan konservasi, dan otoritas tentu melakukan kontrol atas perubahan-perubahan itu, meskipun dalam banyak kasus hasilnya tidak ideal seperti yang mereka harapkan. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini.

Pertama, strategi otoritas perencanaan lokal kurang koheren untuk manajemen. Tampaknya tidak ada tujuan jangka panjang untuk kawasan konservasi dan dalam banyak kasus petugas perencanaan membuat keputusan berdasarkan satu objek saja bukan pada area yang lebih luas. Terutama di pusat-pusat komersial, yang mungkin disebabkan oleh karakter yang beragam dari area-area tersebut.

Ketidakmampuan otoritas perencanaan lokal untuk mengendalikan jejak sejarah di kawasan konservasi adalah karena undang-undang setempat yang kurang mendukung. Petugas perencanaan hanya dapat menangani banyak kasus dengan hati-hati namun pengaruhnya terbatas karena kurangnya dukungan legislatif dan kebijakan.

Kurangnya aspek legislatif ini membuat pemerintah tidak dapat memantau dan memastikan implementasi kondisi perencanaan. Hal ini membuat kontrol pembangunan di kawasan konservasi menjadi kurang ketat dan efektif.

*'adalah salah satu penulis pada buku Dialogues in Urban & Regional Planning. Edited by Bruce Stiftel and Vanessa Watson.*

Dirangkum dan diterjemahkan oleh: Mutri Batul Aini





## Infrastruktur Perkuat Ketahanan Wilayah

ALUMNUS IPB Siti Nurbaya Bakar menilai kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi dalam empat tahun terakhir ini, selain untuk menunjang kemajuan seluruh provinsi di Tanah Air, juga untuk ketahanan wilayah. Kebijakan memprioritaskan pembangunan infrastruktur mencerminkan *style* kepemimpinan Jokowi yang sesuai dengan teori wilayah yang termaktum dalam buku *Regional Planning: Introduction and Explanation by Melville C Branch Praeger* (1988).

Begitu juga pendekatan blusukan sejak sebagai wali kota, gubernur, dan presiden, ditopang teori wilayah. Wilayah secara teori meliputi area, distrik, teritorial, daerah komando, dan tempat operasi. Bisa juga berarti terkait dengan masa peradaban (lembah, sungai, dan lain-lain). Masuk filosofis religi, surga neraka, juga bisa berarti indikasi komersial, yakni tambang dan mineral.

"Oleh karena itu, infrastruktur yang menjadi bagian penting agenda Bapak Presiden dan dirangkum dalam buku, juga merupakan hal yang secara teoretis memang harus dilakukan. Selain untuk memenuhi pembangunan wilayah, dan sangat penting juga untuk semakin memperkuat ketahanan wilayah dan ketahanan nasional kita," ujar Siti Nurbaya yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai Keluarga Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) saat menjadi pembicara kunci bedah buku Jokowi *Perjalanan Karya bagi Bangsa: Menuju Cahaya*, di Puri Beganwan, Bogor, kemarin.

Siti mengaku sangat *concern* dengan konteks dan konten buku tersebut. "Buku karya Alberthiene Endah ini merupakan *story telling* tentang aktualisasi seorang anak manusia bernama Joko Widodo sejak kecil hingga kiprahnya saat ini dan juga mimpi-mimpi besar optimistis bangsa Indonesia ke depan," ucapnya.

Bedah buku yang dipandu Cyrillus I Kerong tersebut berjalan cukup menarik karena mengupas sosok Jokowi dan mendalami kinerja yang selama ini sudah dilakukan. Dengan semakin paham, para pendukung Jokowi bisa menularkan kebaikan Jokowi kepada masyarakat secara objektif.

Ratusan peserta yang tergabung dalam Keluarga Alumni IPB dan kampus-kampus se-Bogor Raya hadir mendengarkan paparan dari penulis Alberthiene Endah, pembahas dari IPB Imam Sugema, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor KH Mustofa Abdullah bin Nuh, dan anggota DPR Budiman Sudjatmiko. (PO/P-2)



Teropong Media edisi 38 ini, akan mengulas dua tulisan. Pertama, terkait berita di Media Indonesia pada Senin 4 Februari 2019 lalu. Berikut ulasannya :

### Pembangunan Infrastruktur Mendukung Terwujudnya Ketahanan Wilayah

Dalam berita yang diberi judul "Infrastruktur Perkuat Ketahanan Wilayah" itu disebutkan bahwa Alumnus IPB Siti Nurbaya Bakar menilai kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi dalam empat tahun terakhir ini, selain menunjang kemajuan seluruh provinsi di Tanah Air, juga untuk ketahanan wilayah. Memperkuat ketahanan wilayah dan ketahanan nasional merupakan persoalan yang sangat penting untuk keutuhan negara.

Terkait hal itu pembangunan infrastruktur sektor PUPR dilakukan berbasis pengembangan wilayah, di mana pembangunan infrastruktur sektor tersebut diarahkan kepada kawasan yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pembangunan infrastruktur sektor tersebut dilakukan untuk mendorong upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang mencakup 97 kawasan strategis, untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah.

Esensi WPS adalah pengembangan wilayah terpadu dengan "*market driven*". Esensi lainnya adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan dan WPS difokuskan pada pengembangan

infrastruktur menuju wilayah strategis. Sisi lain esensi WPS adalah mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS dan mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

Untuk mewujudkan hal itu diperlukan keterpaduan perencanaan antara infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS. Kemudian diperlukan juga sinkronisasi program antar infrastruktur baik dari segi fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana.

Dengan berbasis WPS, infrastruktur sektor PUPR dilakukan terpadu antara direktorat yakni Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Perumahan. Hal itu dilakukan agar suatu daerah dapat tumbuh dengan baik. Daerah yang tumbuh dan berkembang dapat memperkuat ketahanan suatu wilayah.

Ketahanan wilayah sangat penting mengingat beberapa kawasan di Indonesia berbatasan dengan negara lain. Ada beberapa kawasan yang berbatasan laut dengan 10 negara yakni Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Pemerintah telah memperkuat kawasan perbatasan dengan membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, perumahan, dan air bersih.

Bahkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah banyak dibangun, seperti PLBN Aruk di Kalimantan Barat dan PLBN Mota'ain di Nusa Tenggara Barat (NTT). Pembangunan PLBN merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia, negara besar dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur mendukung terwujudnya ketahanan wilayah di seluruh Tanah Air.

# Indonesia, Negeri yang Dikepung Ancaman Bencana Alam

Mencari Solusi Belajar dari Pengalaman Jepang



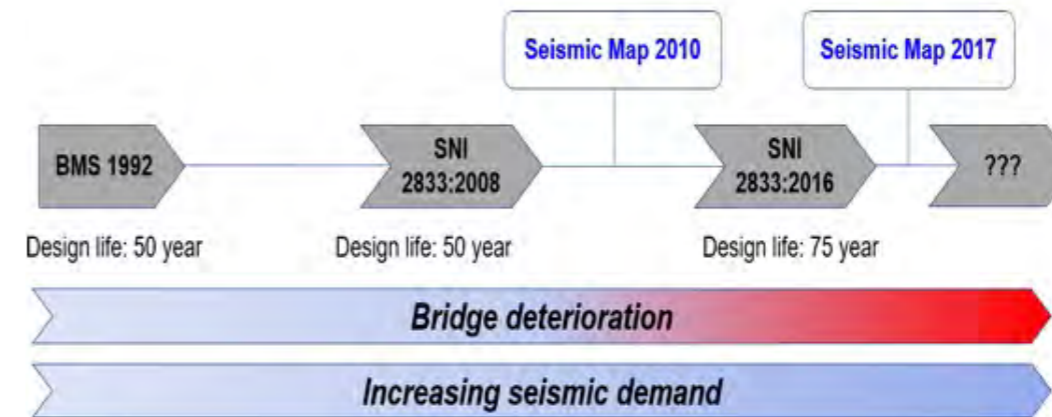
Di balik alam yang indah dan tanah subur, ternyata Indonesia memendam banyak ancaman bencana alam. Pasalnya posisi geografis Indonesia berada dalam kepungan tiga lempeng tektonik dunia, yakni Lempeng Indo-Australian, Eurasia dan Lempeng Pasific. Apabila lempeng tektonik itu bertemu akan menghasilkan energi akibat pergeseran dan akan terjadi gempa bumi. Jika pergeseran tersebut terjadi di laut maka dapat menimbulkan gelombang tsunami.

Posisi Indonesia berada pada *Pacific Ring Of Fire* atau lingkaran cincin api, jalur rangkaian gunung api paling aktif di dunia. Zona cincin api ini memberikan kontribusi besar terhadap kejadian bencana yang terjadi pada pelosok daerah di negara kita. Bencana ini tentunya menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, dampak ekonomi sosial dan budaya akan sangat terasa pada wilayah terdampak bencana. Salah satu kerugian yang paling besar dirasakan selain korban jiwa adalah kerusakan infrastruktur.

Infrastruktur yang dibangun untuk kemaslahatan masyarakat jika mengalami kerusakan akan menghambat tidak hanya aktivitas ekonomi dan sosial

pada tetapi sektor pendidikan dan kesehatan pun akan berpengaruh. Hal ini yang menyadarkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur diperlukan perhitungan resiko ancaman bencana yang dapat merusak infrastruktur terbangun.

Guna mewujudkan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berketahanan terhadap bencana di Indonesia, Pemerintah Indonesia dan Jepang melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang melakukan kerja sama berupa *"The Sixth High Level Meeting on Infrastructure Development Cooperation between*



*Indonesia and Japan,*" di Kampus Kementerian PUPR di Jalan Pattimura Jakarta.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti menyampaikan, Indonesia saat ini sedang menghadapi permasalahan dalam membangun infrastruktur, terutama pada area terdampak bencana alam. Di sisi lain Jepang dikenal sebagai negara yang kerap diterpa bencana dan kemudian bangkit kembali. "Seyogyanya, Indonesia terutama Kementerian PUPR dapat belajar dari Jepang mengenai pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana," terang Anita.

Hal ini juga termasuk tahap kesiapsiagaan dan edukasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Kemudian, penanganan pasca bencana dalam bidang infrastruktur memerlukan perhatian khusus. Sebagai contoh dalam kurun waktu tahun 2015-2019, Kementerian PUPR diamanatkan untuk membangun sejumlah 65 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Hal ini merupakan tantangan bagi Kementerian PUPR tidak hanya dalam membangun tetapi juga pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia harus diperhatikan," lanjutnya.

Kepala Balai Litbang Struktur Jembatan Joko Purnomo menyatakan, saat ini sebanyak 90.308 jembatan yang tersebar pada jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa memerlukan penanganan tersendiri.

Kondisi jembatan tersebut bervariasi, mulai dari kondisi baik sampai rusak berat. Data Kementerian PUPR menunjukkan bahwa jembatan yang dalam kondisi baik sebesar 37 persen, rusak ringan sebanyak 22 persen, rusak sedang sebanyak 30 persen, rusak berat sebanyak 9 persen, kondisi kritis sebanyak 2 persen, dan jembatan runtuh sekitar satu persen dari total jembatan yang ada.

Saat ini pembangunan desain jembatan yang mempunyai ketahanan gempa telah ditetapkan melalui Standar Nasional Indonesia, termasuk mengacu pada peta bencana.

Sementara itu, Kepala Puslitbang Sumber Daya Air Eko Winar Irianto memaparkan, sebanyak 105 kejadian tsunami yang terjadi di Indonesia dari tahun 1600-1999 90 persen disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen erupsi gunung berapi, dan satu persen oleh longsor.

Salah satu kerangka untuk mereduksi dampak tsunami adalah implementasi manajemen pesisir yang terpadu pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Program yang termasuk dalam kerangka kerja manajemen pesisir harus meliputi lima hal, sistem peringatan dini, penanggulangan secara struktural, penanggulangan non-struktural, kajian tsunami dan aturan hukum pengelolaan bencana nasional.

Eko mengatakan, sistem peringatan dini merupakan dasar bagi semua pengelolaan bencana untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Saat ini sistem tersebut hanya dapat memberikan peringatan dini terhadap tsunami yang

Sistem peringatan dini merupakan dasar bagi semua pengelolaan bencana untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Saat ini sistem hanya dapat memberikan peringatan dini terhadap tsunami yang disebabkan oleh gempa tektonik.

disebabkan oleh gempa tektonik yang berada jauh dari area terdampak.

Tindakan struktural penanganan tsunami dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan tembok laut dan pemecah gelombang yang dikategorikan pada penanganan struktural keras. "Tindakan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tetapi dapat memberikan perlindungan bahaya yang luas. Kelemahannya, tindakan ini tidak ramah lingkungan," jelasnya.

Di sisi lain penanganan struktural lunak yang diimplementasikan dengan penanaman pohon bakau, penanaman hutan pesisir dan pengaturan pemanfaatan lahan pesisir dapat mengurangi resiko tsunami dan dinilai lebih ekonomis serta ramah lingkungan.

Selain penanganan struktural terdapat penanganan tsunami non-struktural yang mengedepankan kesadaran masyarakat akan bahaya, penetapan rencana tata ruang, kebijakan nasional mitigasi tsunami dan kajian tsunami di Indonesia.

"Selanjutnya wilayah pesisir Indonesia yang rawan tsunami dan bahaya alam lainnya harus memiliki rencana tata ruang pantai yang menggabungkan mitigasi bahaya melalui penetapan zonasi, sabuk hijau mangrove, hutan pantai dan akses jalan dari pantai ke pedalaman untuk keperluan evakuasi," ungkap Eko.

Sementara itu, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR Bobby Prabowo menerangkan, Kementerian PUPR telah membangun infrastruktur di berbagai sektor dengan tujuan mitigasi terhadap perubahan iklim ekstrim yang terjadi di seluruh dunia, antara lain pembangunan kanal di Pulau Pisau, Kalimantan untuk mereduksi bencana kabut asap, pembangunan Kanal Banjir Timur, dan *Jakarta Sea Wall* untuk meminimalisir dampak banjir, serta pembuatan RISHA sebagai rumah tahan gempa.

Selain itu, pembangunan kota hijau dan *Transit Oriented Development* (TOD) menjadi perhatian utama dalam pengembangan suatu kawasan.

Selain itu, BPIW juga tengah menyusun perencanaan yang mengadopsi mitigasi pengurangan risiko bencana. Menurutnya, perencanaan dan program Kementerian PUPR perlu memuat bahasan mengenai tanggap risiko bencana, agar dapat melakukan pengurangan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.

Kerugian tersebut, ungkapnya, dapat berupa kerusakan aset infrastruktur PUPR, kematian, korban luka, jiwa yang terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

"Untuk mencapai hal tersebut, tentunya diperlukan strategi dalam penyelenggaraan kegiatan sektor PUPR yang terpadu dan sinkron," ungkap Bobby.

la menambahkan, konsep strategi tersebut perlu tertuang dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah yang berbentuk rencana pengembangan infrastruktur terpadu antarsektor, antartingkat pemerintah dan antarpulau.

#### Jepang Senantiasa Tingkatkan Standar Ketahanan Bangunan

Direktur Departemen Bangunan, Institut Nasional Pertanahan dan Manajemen Infrastruktur, Jepang, Hiroshi Fukuyama memaparkan, dalam mengantisipasi bencana, Jepang melakukan mengembangkan standar ketahanan bangunan terhadap aktivitas seismik.

Menurutnya, standar ketahanan bangunan pertama kali ditetapkan pada tahun 1924. Hal itu terjadi dipicu oleh peristiwa gempa bumi Kanto dengan kekuatan 7,9 skala Richter yang terjadi pada tahun 1923. Dimana gempa tersebut mengakibatkan lebih dari 211.000 bangunan terdampak bencana tersebut.

"Kemudian pada tahun 1971, standar direvisi berdasarkan gempa yang terjadi di Tokoachi tahun 1968," terangnya.

Peristiwa gempa Tokoachi meruntuhkan bangunan yang sudah memenuhi standar dan tingkat ketahanan gempa yang disusun pada tahun 1924. Hiroshi menjelaskan, pada tahun 1981 ditetapkan



Tsunami Palu

Sumber: Dok. BPIW

Standar Ketahanan Gempa Baru dengan menitikberatkan pada dua hal. "Pertama, bangunan tidak boleh runtuh jika terjadi gempa skala menengah. Adapun kedua, bangunan tidak hancur jika dilanda gempa pada skala besar," jelasnya.

Kenyataan pada tahun 1995, lanjutnya, gempa bumi besar terjadi di Kobe menyebabkan sekitar 249.000 bangunan rusak dan runtuh. "Berangkat dari hal tersebut, dilakukan verifikasi terhadap bangunan yang dibangun pada tiga kurun waktu, yakni sebelum 1971, antara 1972-1981 dan setelah 1982," terangnya.

Setelah verifikasi dilakukan bangunan sebelum tahun 1971 yang rusak ringan sebesar 42,5 persen dan runtuh sebesar 16,7 persen. "Sedangkan bangunan yang dibangun setelah tahun 1982, didapatkan kerusakan ringan sebesar 86 persen dan bangunan yang runtuh hanya sebesar 3,3 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa desain bangunan berdasarkan standar ketahanan gempa baru tahun 1981 sudah cukup layak," terangnya.

Namun demikian, masih terdapat bangunan runtuh sehingga diperlukan standar ketahanan yang lebih untuk memperkuat ketahanan bangunan terhadap gempa.

"Dari masalah tersebut Jepang melahirkan Undang-Undang Perbaikan Ketahanan Gempa pada tahun 1995 yang merekomendasikan teknik retrofit pada bangunan terdampak dan panduan pelaksanaan retrofitting," jelasnya.

Dengan dikeluarkannya UU tersebut terdapat kewajiban evaluasi ketahanan gempa pada bangunan-bangunan tertentu. Pada tahun 2013, dilakukan revisi terhadap UU itu dengan mewajibkan pemilik bangunan dengan kriteria dan

ukuran tertentu juga melakukan evaluasi ketahanan bangunan.

la juga menerangkan, gempa bumi dahsyat yang terjadi di Jepang bagian timur tahun 2011 dengan kekuatan Magnitudo 9 yang diikuti dengan gelombang tsunami menimbulkan kerusakan pada bangunan yang terletak pada jarak yang cukup jauh.

"Salah satunya dialami pada gedung setinggi 55 lantai dengan struktur baja di Osaka yang terletak pada 770 km dari episentrum," jelasnya.

Kerusakan pada gedung ini diakibatkan oleh rambatan resonansi gempa pada tanah.

Getaran gempa ternyata dapat menimbulkan kerusakan pada interior bangunan yang menimbulkan korban jiwa meskipun secara struktur, bangunan tersebut tidak mengalami kerusakan berarti, sehingga perlu adanya ketentuan baru yang mengatur konsep desain interior, terutama penempatan ceiling dan plafon. Hal ini menginisiasi perlunya penyusunan mekanisme penanganan efek getaran gelombang panjang pada gempa.

Jepang sebagai negara adidaya yang rentan terhadap ancaman bencana tidak pernah berhenti memikirkan dan melakukan upaya berkelanjutan penyempurnaan *building code* sebagai cara untuk mereduksi korban jiwa dari dampak gempa terhadap infrastruktur terbangun, dan sudah seharusnya Indonesia pun melihat *building code* sebagai sebuah keharusan yang diterapkan dalam pembangunan infrastruktur PUPR untuk mewujudkan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana. (Rih/Ris/infoBPIW)

Perlu adanya ketentuan baru yang mengatur konsep desain interior, terutama penempatan ceiling dan plafon.

Perencanaan dan program Kementerian PUPR perlu memuat tentang tanggap risiko bencana



Bencana alam seperti gempa, tsunami, dan likuifaksi pernah terjadi di beberapa kota di Indonesia seperti di Aceh, Lombok, dan Palu. Berbagai upaya dilakukan baik sebelum maupun pasca bencana. Seperti apa pandangan beberapa ahli maupun pakar baik di Indonesia dan Jepang terkait hal itu?. Berikut

## Bangunan Tahan Gempa di Indonesia



**Prof(R) Dr. Ir. Arief Sabaruddin, CES.**

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan

Membangun infrastruktur Indonesia sudah mempunyai peraturan mengenai ketahanan gempa (Indonesia *Seismic Code*) yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1981 dengan nama Peraturan Pembebanan Indonesia. Selama rentang waktu tahun 1971-2013 terdapat 12 tata cara perencanaan ketahanan gempa bagi bangunan yang digulirkan sebagai acuan dalam membangun rumah dan gedung.

Indonesia juga sudah memiliki peta rawan gempa tahun 2010 dan 2017 yang menggambarkan wilayah rawan gempa sehingga jika peraturan ketahanan gempa bangunan (*building code*) dikombinasikan dengan peta rawan gempa, didapatkan kriteria bangunan yang sesuai standar ketahanan untuk diaplikasikan pada daerah masing-masing sesuai dengan kondisi tingkat kerawanan gempa. Namun, kombinasi dua hal ini dirasakan masih belum dapat mereduksi dampak gempa bumi pada infrastruktur di Indonesia.

Kini telah ditemukan dua faktor utama permasalahan pada pembangunan infrastruktur. Pertama, disebabkan adanya pemilihan bahan bangunan yang tidak sesuai standar dan kedua, terdapat permasalahan mendetail



Rumah tahan gempa dengan Teknologi RISHA dari Balitbang Kementerian PUPR.

Sumber: Balitbang PUPR

dalam pekerjaan konstruksi. Jika dua hal ini dapat diselesaikan diperkirakan jumlah korban pada saat terjadi gempa dapat direduksi. Selain itu kendala terbesar yang dihadapi adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang aturan bangunan tahan gempa sebagai acuan dalam membangun rumah dan gedung.

### Penilaian dan Pengukuran Likuifaksi

**Masanori Ishihara**  
Geolog dari Institut Penelitian  
Pekerjaan Umum Jepang

Beberapa metode asesmen dan tindakan yang dapat diambil terhadap daerah terdampak likuifaksi.

Daerah rentan likuifaksi mempunyai tiga kriteria umum sebagai berikut:

- Mengalami guncangan yang keras akibat gempa
- Mempunyai kandungan air tanah yang tinggi
- Profil tanah berpasir yang tidak padat dan berongga.

Disamping itu juga terdapat tiga macam metode yang digunakan untuk melakukan asesmen pada daerah likuifaksi yaitu *preliminary method* (metode pendahuluan), *simplified method* (metode yang disederhanakan), *detailed method* (metode terperinci). Setiap metode ini meliputi empat obyek yang diteliti yaitu kondisi tanah, karakteristik kekuatan tanah, karakteristik deformasi dinamis dan karakteristik gempa bumi.

*Preliminary method* yang lebih awam disebut klasifikasi geomorfologi, yang mana pengamatan dan analisis dilakukan terbatas hanya pada kondisi geomorfologi tanah. Sedangkan pada *simplified method* biasanya dilakukan dengan membandingkan faktor ketahanan terhadap bahaya likuifaksi dengan rasio pergeseran tekanan pada gempa, disebut juga *FL Method*.

Metode ini dapat dibidang cukup rumit dalam hal perhitungan dan pengukuran untuk setiap obyek yang diteliti, tetapi metode ini cukup terbukti memberikan hasil yang relatif akurat di daerah terdampak pada gempa bumi dahsyat di Jepang bagian timur tahun 2011. Penyempurnaan *FL Method* ini dilakukan pada tahun 2017-2018 untuk desain tanggul sungai dan jembatan. Metode ketiga dan terakhir yaitu *dynamic*

## Analisis pakar

*response analysis* merupakan versi terbaru yang dikembangkan dari *FL Method* yang akan diterapkan di Jepang pada masa mendatang.

Tindakan yang dilakukan pada daerah terdampak likuifaksi dapat digolongkan menjadi dua kategori, pertama, tindakan yang dilakukan untuk mencegah likuifaksi terjadi kembali dan kedua, tindakan yang dilakukan untuk menurunkan dampak likuifaksi terhadap infrastruktur yang rusak.

Metode pertama memiliki prinsip tindakan pencegahan terjadinya likuifaksi dengan penguatan pada struktur tanah dan penurunan tekanan air. Sedangkan metode kedua lebih kepada mekanisme untuk penguatan struktur bangunan yang dilakukan dengan rekayasa teknik. Ishihara juga menyampaikan untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik diperlukan pemahaman yang jelas dalam membedakan daerah yang terdampak dan tidak terdampak likuifaksi.

### Kebijakan dalam Rekonstruksi Pasca Gempa Dahsyat di Jepang

**Tatsuro Imai**

Deputi Direktur Senior dari Kantor Urusan Internasional, Kementerian Lahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang

Kebijakan dalam rekonstruksi pasca gempa dahsyat Jepang tahun 2011 yang tertuang dalam

*Urban Policy for Reconstruction after Great East Japan Earthquake 2011*. Gempa bumi yang terjadi di bagian timur Jepang menimbulkan dampak yang sangat destruktif, meliputi enam prefektur yang berada pada kawasan pesisir.

Luas area terdampak diperkirakan sebesar 535 km<sup>2</sup> yang mayoritas terletak di kawasan perkotaan. Dengan total kerusakan bangunan sebanyak 1.087.032 unit, diperlukan strategi pembangunan kembali wilayah terdampak yang tepat. Kebijakan ini diinisiasi oleh Kementerian Lahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Terdapat tiga langkah awal yang dilakukan oleh MLIT sebagai bentuk strategi penanganan pembangunan kembali. Pertama, dilakukannya survei dan analisis situasi bencana. Kedua, mempelajari pola rekonstruksi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat perkotaan dan ketiga, mempelajari cara dan metode pendekatan rekonstruksi pada masyarakat perkotaan. Hasil dari langkah tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkan lima desain pola pendekatan rekonstruksi yang ditawarkan kepada pemerintah daerah yang diteruskan kepada masyarakat.

Masyarakat diberikan keleluasaan untuk memilih alternatif pilihan yang tepat bagi tempat tinggalnya. Pola pendekatan tersebut adalah relokasi, agregasi pada tempat yang sama, peninggian elevasi, kombinasi relokasi dan peninggian elevasi, serta pembangunan kembali di tempat lama. Setelah desain perencanaan ditetapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah



Gambar ilustrasi akibat gempa di Jepang tahun lalu.

Sumber: Istimewa



pusat memberikan dukungan pembangunan dari sisi kemudahan perolehan lahan, fasilitasi regulasi dan peningkatan angka subsidi finansial untuk pembangunan perumahan termasuk sarana dan prasarana umum.

Pengembangan wilayah terutama di kawasan perkotaan membutuhkan dukungan infrastruktur mumpuni. Salah satu dasar dalam pertimbangan pembangunan pusat pertumbuhan baru adalah kemudahan akses. Hal ini yang mendasari pembangunan wilayah di Jepang mengadopsi model pengembangan yang terintegrasi dengan sektor transportasi umum, seperti yang tertuang dalam paparan dengan judul *Transit Oriented Development (TOD)*. Metode ini mendorong penduduk yang tinggal di daerah sub-urban untuk menggunakan kendaraan umum sebagai moda transportasinya.

Pendekatan TOD dikembangkan untuk dapat mengintegrasikan hunian dengan stasiun kereta, terminal bus, taksi area, gedung perkantoran dan area komersial sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dan kemacetan yang terjadi pada kota besar dapat ditekan.

Jepang bekerja sama dengan pengembang lokal telah mengembangkan konsep kota baru di kawasan metropolitan Jakarta yang mengadopsi

konsep TOD. Pendampingan dan dukungan proyek infrastruktur serta mekanisme investasinya ditangani oleh *Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN)*. Beberapa proyek di Indonesia yang bekerja sama dengan JOIN.

### Membangun Kota Cerdas Dengan Desain yang Memadai

**Naoki Omori**

Badan Peremajaan Perkotaan Jepang

Konsep pembangunan dengan prinsip TOD bertujuan untuk membangun Kota Cerdas (*Smart City*) berdasarkan prinsip efisien, inklusif, inovatif dan kreatif, tangguh serta sinergi dengan desain memadai. Badan Peremajaan Perkotaan telah berhasil membangun 281 proyek seluas 41.500 hektar meliputi 1,58 juta rumah, dengan 253 proyek merupakan TOD, termasuk kota Otemachi, Minatomarai 21 dan Umekita. *Granfront Osaka* saat ini tengah dikembangkan menjadi kawasan pusat perbelanjaan terintegrasi dengan Umekita dengan konsep TOD.

## Greater and Greener

# Sebuah Upaya Negara Maju Terhadap Peningkatan Kualitas Kota Melalui Seminar Mengenai Taman Kota

Maylinda Permata Sari

Kepala Sub Bidang Penyusunan Program I  
Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR  
BPIW Kementerian PUPR

Perhatian negara-negara maju terhadap kualitas kota-kotanya terus ditingkatkan melalui upaya peningkatan kualitas taman-taman kota. Kondisi lingkungan yang sudah terjaga dan tertata baik tidak dibiarkan statis dan sekedar dipelihara, namun diupayakan terus mengikuti perkembangan kebutuhan warganya serta untuk terus meningkatkan daya tarik kota.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan seminar mengenai *Urban Parks*. Seminar ini diselenggarakan oleh *City Park Alliance (CPA)* di Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat (AS) pada tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus 2017 lalu di *Saint Paul RiverCentre*. CPA diklaim sebagai satu-satunya organisasi independen di AS yang didedikasikan untuk taman kota.

Seminar bertajuk "*Greater & Greener 2017: Parks Connecting Cities, Cultures, & Generations*" tersebut diselenggarakan di dua kota yaitu Saint

Paul dan Minneapolis, yang disebut sebagai *Twin Cities* di Minnesota. CPA juga bekerja sama dengan *Minneapolis Park and Recreation Board (MPRB)*, serta *Saint Paul Parks and Recreation*. Lembaga ini mengelola dana donasi dengan sebuah tujuan nasional: *A great park within a 10-minute walk of every home, in every neighborhood, in every city across America*.

Saat ini masih sekitar 100 juta warga Amerika Serikat yang belum memiliki akses 10 menit pencapaian dengan berjalan kaki menuju taman publik dari rumah. Akses waktu, bukan hanya jumlah, sehingga **distribusi** menjadi penting. Dan *great park*, bukan sekedar *park*, sehingga **kualitas** juga utama. Ada beberapa catatan untuk beberapa sesi yang dipilih dalam seminar, yang disesuaikan dengan jadwal perjalanan serta minat penulis.

Kegiatan pada hari pertama adalah *Special Training, PARKXCHANGE City Workshop*:

*CrossAgency Partnership*. Pemimpin kota harus dapat bekerja efektif dengan berbagai pihak dalam menyediakan pelayanan publik yang maksimal/terbaik (bukan minimal) dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan serta keahlian yang dapat diperoleh dari swasta, organisasi nonprofit serta sumber daya pemerintah.

Kegiatan selanjutnya adalah *Minneapolis Playgrounds mobile workshop*. Acara tersebut merupakan kunjungan ke beberapa *playgrounds* yang didedikasikan bagi warga kota di lingkungan tersebut. Dalam *workshop* ini dijelaskan mengenai keberadaan sebuah taman bermain yang berkualitas dan dekat dengan lingkungan tempat tinggal dapat menstimulasi aktifitas fisik di luar ruangan bersama keluarga, menstimulasi anak untuk bermain sambil belajar, serta dapat mempererat ikatan komunitas. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah East Minnehaha *playground* bertema *Talking is Teaching: Talk, Read, Sing*.

Struktur permainan dengan fasilitas pembelajaran ini juga terkait dengan kampanye nasional *Too Small to Fail*, yang menggalakkan literasi di usia dini. *Playground* lain yang dikunjungi adalah *MLK Park* yang bertemakan hak sipil, dimana permainan ini mengedukasi pengunjung mengenai *Dr. Marthin Luther King's Legacy*. Legasi Dr. King merupakan simbol perjuangan terhadap kesamaan hak dan perlawanan terhadap rasisme serta xenophobia. *Playground* ini merupakan bagian dari *MLK Recreation Center*, dibangun dengan peran serta komunitas sekitar yang didominasi oleh warga Afro-Amerika, dengan akses yang terbuka untuk pengunjung segala usia dan segala ras.

Dengan kekhasannya masing-masing, setiap *playground* memiliki kesamaan. Sebagaimana halnya dengan *playgrounds* di seluruh tanah Amerika Serikat, letaknya berada di taman kota dengan *lawn* (lapangan rumput hijau yang sangat luas) khas Amerika membentang terpelihara sangat baik tanpa pagar dan tanpa tanda larangan untuk diinjak. Fasilitas struktur permainan dan berbagai kelengkapannya diwajibkan memenuhi standar kualitas *playground* yang berlaku di seluruh AS. Standar yang berlaku di AS saat ini adalah *Public Playground Safety Handbook* yang

dikeluarkan oleh *US Consumer Product Safety Commission* tahun 2015.

## Memiliki Standar Tersendiri

Biasanya, setiap negara maju memiliki standar tersendiri yang pada dasarnya semua memperhatikan faktor keselamatan bagi anak, perbedaan segmen usia anak, serta standar bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk memenuhi hak akan bermain di ruang publik oleh seluruh warga. Taman kota juga dapat disewa untuk kegiatan edukasi luar ruangan seperti *Urban Explorer Camp, Archery in the Parks, Ceramic Open Studio*, atau *Ice Cream Social*. Biaya sewa yang semua proses pendaftarannya dilakukan secara online dikelola untuk biaya pemeliharaan taman tersebut.

Selanjutnya acara *International Forum* diselenggarakan pada hari keempat di *Toro World Headquarters*, Bloomington, MN. Ini adalah acara yang disponsori oleh Toro, sebuah perusahaan alat berat berlokasi di Bloomington Minnesota yang didirikan pada tahun 1914, bergerak di bidang konstruksi dan pemeliharaan lapangan/ruang luar termasuk sarana olahraga. Forum ini mencakup pemutaran video dan paparan dari para pembicara dari berbagai negara termasuk walikota Tirana dari negara Albania, para CEO dari berbagai perusahaan, Professor dari Universitas Seoul, Arsitek Bentang Alam dari Gothenburg Swedia, serta pemerintah setempat dari kota Saint Paul.

Terdapat tiga topik yang disampaikan yaitu pertama adalah "*Healthy Parks, Healthy Cities*" yang melihat kontribusi sistem taman kota bagi peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat, kedua "*River Revolution Cities*" yang membahas tentang sistem Riparian (tepi sungai) serta tantangan dan solusi dalam pemanfaatan sungai untuk fungsi rekreasi, dan ketiga "*Large Parks and Cities*" yang membahas mengenai pentingnya keberadaan taman yang luas di dalam kota untuk keberlanjutan kota tersebut.

Kegiatan pada hari itu juga mencakup *Toro Campus Tour* untuk melihat fasilitas penelitian produk sebelum memasuki pasar. Yang menarik adalah sebelum *tour* pengunjung diwajibkan untuk menandatangani *form* kesepakatan untuk tidak membuka rahasia perusahaan. Seminar

ini juga mencakup kegiatan pameran, dan kita dapat memperoleh informasi mengenai produk-produk yang mendukung pembangunan taman kota, perlengkapan aktivitas *outdoor*, dan struktur permainan *outdoor* yang inovatif ala Amerika.

*Greater & Greener International Conference* diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Saint Paul Minnesota 2017 adalah penyelenggaraan ke tiga setelah tahun 2015 diselenggarakan di San Fransisco. Selanjutnya, *Greater & Greener 2019: Exploring Natural Connections* akan diselenggarakan pada tanggal 20-24 Juli 2019 di Denver, Colorado, USA. Kota Denver akan menampilkan wisata *mountain parks* yang khas, juga *The High Line Canal* sebagai taman kota spektakuler berbentuk linear yang terpanjang di Amerika Serikat, serta *Red Rock* yang membentuk *amphitheater* alami dengan situs purbakala yang menyimpan fosil dinosaurus dari era *Jurassic*.

Di Amerika Serikat, pembiayaan bagi 42.000 taman-taman kota dan taman lingkungan, taman bermain (*playgrounds*), hutan kota, jalur hijau, dan ruang terbuka diperoleh tidak hanya dari dana pemerintah atau dana publik, melainkan juga dari *Land & Water Conservation Fund (LWCF)* yaitu royalti yang berkesinambungan dari perusahaan minyak dan gas yang dikelola oleh *City Parks Alliance*. Sejak 2013, investasi negara bagian bagi taman kota juga mulai meningkat.

Nilai pentingnya taman dapat dibuktikan secara terukur, sehingga data dalam sebuah kajian *Smart Parks* menunjukkan bahwa **setiap 1 USD yang diinvestasikan untuk taman kota akan menghasilkan 20 USD peningkatan ekonomi**. Nilai keuntungan ini terwujud dalam bentuk peningkatan nilai properti yang berada di dekat taman dan ruang publik, meningkatnya jumlah turis/pengunjung pada lokasi yang banyak terdapat taman, serta berkurangnya biaya kesehatan dan pengobatan akibat gaya hidup dan mental yang sehat yang terwujud dengan tersedianya taman kota yang menarik untuk aktivitas olahraga.

Dari sisi medis juga telah dibuktikan bahwa **setiap satu USD yang diinvestasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalur olahraga di taman kota akan menghemat tiga USD yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan**. Juga, **setiap 150 juta USD investasi bagi pembangunan taman kota akan menciptakan dua miliar USD aktivitas ekonomi**. Hal itu membuktikan betapa pentingnya sebuah taman kota dan sistem jaringannya bagi peningkatan ekonomi kota.

*City of Houston* memiliki **65 hektar lahan hijau yang berfungsi mengurangi banjir sebesar 400 persen**, meningkatkan jumlah tenaga kerja dari 1.400 menjadi 11.000, meningkatkan nilai penjualan retail sebesar 500 persen, dan



Taman Dr. Martin Luther King, Jr. di Minneapolis, Minnesota, Amerika.

Sumber: koleksi pribadi

meningkatkan nilai properti sebesar 20 persen. *City of Philadelphia* memiliki program *Green City, Clean Water* dengan investasi sebesar dua miliar USD untuk taman dan pembangunan infrastruktur hijau, dan **berhasil memperbaiki 85 persen tangkapan aliran air sehingga menghemat 14 miliar USD yang seharusnya digunakan untuk membiayai pipa dan saluran bawah tanah**. *City of Atlanta* menghemat 16 juta USD dengan **membangun kolam retensi sebagai upaya mitigasi banjir, dibandingkan dengan membangun saluran bawah tanah dan memasang jaringan pipa untuk mengatasi permasalahan**.

Taman di Atlanta juga terhubung dengan jaringan transportasi *Atlanta BeltLine*. Proyek visioner ini juga mencakup jaringan taman dan jalur pejalan kaki yang menerus sepanjang 35.000 km yang menghubungkan 45 lingkungan permukiman serta berbagai pilihan transportasi publik, sehingga warga semakin nyaman dan kualitas hidup semakin meningkat. Kesehatan fisik dan mental adalah yang utama. Warga yang sehat dan cerdas merupakan sumber daya dan investasi tak ternilai bagi keberlanjutan pembangunan

di masa depan. Seorang bijak mengatakan, janganlah berpikir pembangunan terlalu sektoral. Pertimbangkan berbagai dimensi dampak atas setiap pilihan bentuk investasi pembangunan infrastruktur kota.

Di Indonesia, penyediaan RTH publik di perkotaan sejalan dengan Pilar Pembangunan Indonesia 2045 yaitu peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat dalam pilar Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu dan Teknologi (Iptek). RTH publik dapat menjadi sumbangsih pembangunan infrastruktur di bidang pembangunan sumber daya manusia. Dalam tataran internasional, penyediaan RTH publik perkotaan juga menjadi poin penting Agenda Baru Perkotaan (*The New Urban Agenda*) serta pengarusutamaan infrastruktur hijau.

*Finally, You can't be in a great city without great parks, can you?*

Referensi: [www.greener.org](http://www.greener.org), [www.citiparksalliance.org/action-center/infrastructure](http://www.citiparksalliance.org/action-center/infrastructure)



Permainan anak di Taman East Minnehaha Playground Minneapolis Minnesota, Amerika.

Sumber: koleksi pribadi



Judul Buku :  
**Membangun Peradaban Kota**  
 Penulis :  
 Nirwono Joga dan Dhaneswara Nirwana Indrajoga  
 Penerbit :  
 Gramedia Pustaka Utama  
 Tahun Terbit : 2018  
 Jumlah Halaman: 284 halaman

Buku ini memuat 50 tulisan yang tersaji dalam delapan bab besar. Tulisan-tulisan tersebut mengulas persoalan tentang dinamika perkembangan ibu kota. Di antaranya adalah tulisan mengenai banjir, kepadatan penduduk, kemacetan, penyediaan hunian, revitalisasi pasar, dan arah perkembangan kota ramah infrastruktur gender, yang semua bertujuan untuk mewujudkan peradaban baru kota.

# Membangun Peradaban Kota

Kota-kota yang berubah ke arah perbaikan lebih banyak karena memiliki pemimpin yang berkualitas dan mampu menggalang warga, serta didukung aparat pemerintah daerah dan legislatif. Modal terbesar dalam pengelolaan kota adalah pemimpin dan kepemimpinannya.

Pemimpin dapat melihat dan mengoptimalkan energi besar masyarakat untuk dilibatkan dalam proses pembangunan, kemampuan birokrasi yang bisa dimaksimalkan, menjalin komunikasi yang harmonis dengan dewan legislatif, sentuhan teknologi yang mampu menaikkan produktivitas warga, serta dukungan kuat dari dunia usaha.

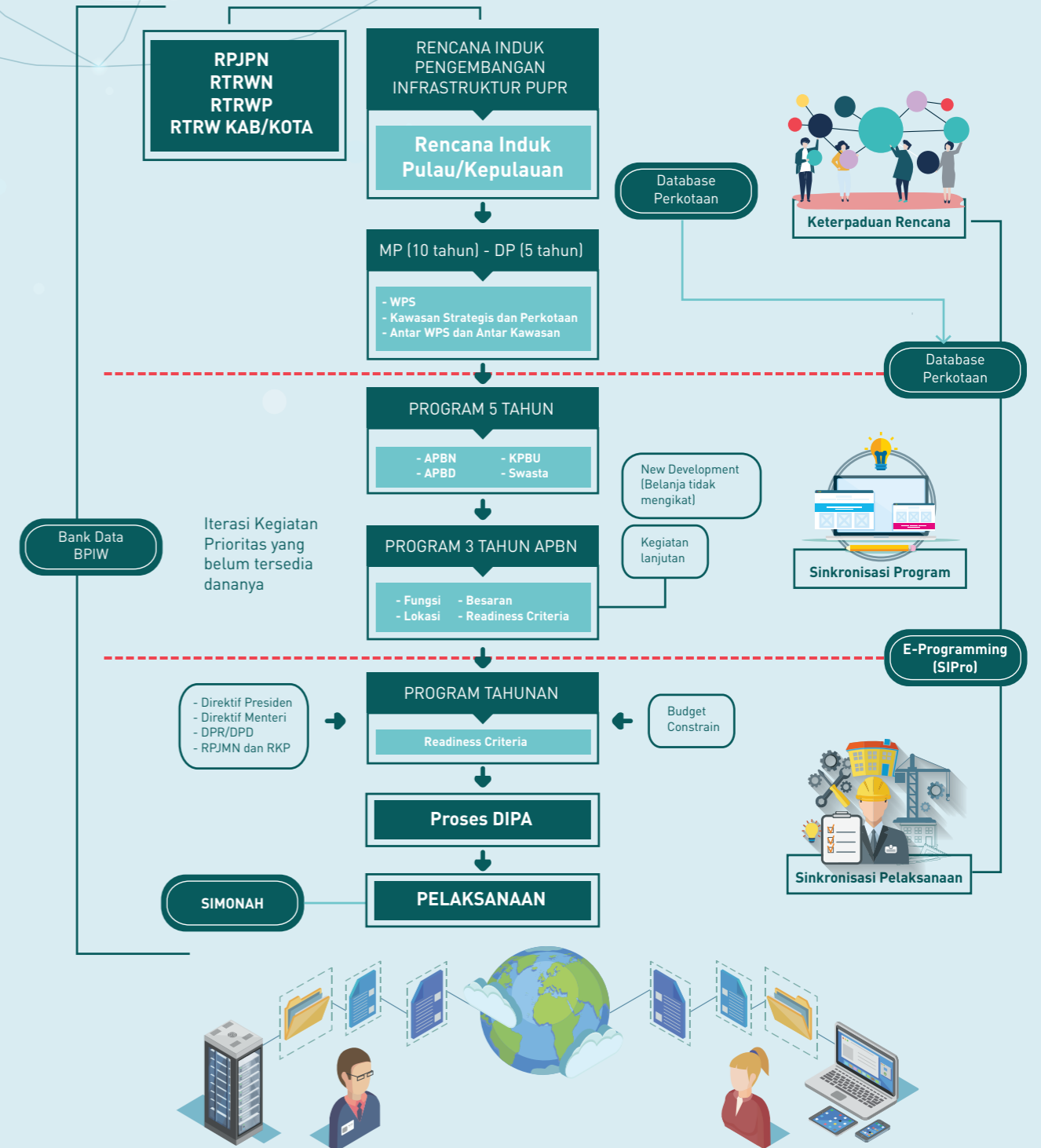
Saat bicara kota, selalu ada manusia/ warga dan lahan/ tempat tinggal, perencanaan fisik yang matang (memenuhi fungsi dan teknis), dan dikelola secara berkelanjutan. Warga dituntut cerdas memilih pemimpin dengan melihat rekam jejak dan visi misi membangun kota berdasarkan kebutuhan warga, membuat penduduk bahagia, aman, dan nyaman terhadap kotanya.

Buku ini memuat 50 tulisan yang tersaji dalam delapan bab besar. Tulisan-tulisan tersebut mengulas persoalan tentang dinamika perkembangan ibu kota. Di antaranya adalah tulisan mengenai banjir, kepadatan penduduk, kemacetan, penyediaan hunian, revitalisasi pasar, dan arah perkembangan kota ramah infrastruktur gender, yang semua bertujuan untuk mewujudkan peradaban baru kota.

Nirwono Joga, penulis buku ini adalah seorang penulis, Penggiat Gerakan Ayo ke Taman, Koordinator Kemitraan Kota Hijau, dan sederet aktivitas lainnya. Sebelumnya penulis telah menerbitkan delapan buah buku yang bertemakan perkotaan. **(Mutri)**

# SISTEM INFORMASI PENDUKUNG PROSES PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN DI BPIW

BPIW Kementerian PUPR kini telah memiliki sistem informasi pendukung proses perencanaan dan pemrograman. Ada empat sistem informasi tersebut. Pertama, Sistem Informasi Database Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR (SIBAS RIPI). Sistem ini membantu pelaksanaan keterpaduan perencanaan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah. Kedua, Sistem Informasi Pemrograman (SiPro). Sistem ini mendukung proses penyiapan program pengembangan infrastruktur PUPR. Ketiga, Sistem Monitoring Pengadaan Tanah (Simonah). Sistem tersebut untuk mempermudah fasilitasi pengadaan tanah. Sistem informasi keempat adalah Bank Data BPIW. Bank data merupakan himpunan data BPIW yang dikelola dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW. Dengan keempat sistem ini, maka data-data terkait perencanaan dan pemrograman seperti pembuatan rencana pengembangan infrastruktur PUPR hingga program tahunan serta hal-hal lain dapat dihimpun dengan baik.



# Berwisata Di Bumi Rafflesia



Bukit Kaba.

Sumber: Istimewa

Kota dengan Julukan Rafflesia Arnoldi ini memiliki berbagai destinasi pariwisata, diantaranya adalah Rumah Pengasingan Bung Karno, Pantai Panjang, Benteng Marlborough dan juga pantai Tapak Paderi dan masih banyak lagi, destinasi yang bisa kita nikmati di Kota Bengkulu ini.

**K**ota Bengkulu mungkin belum sepamor Padang ataupun Palembang. Akan tetapi jangan salah, kota ini disebut-sebut kota kecil yang indah karena banyak tempat wisata yang cukup mudah dijangkau dari pusat kotanya. Bengkulu merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera, setelah Kota Padang dimana,

**S**elain memiliki keajaiban, dimana terdapat bunga terbesar di Dunia yakni Rafflesia Arnoldi, Kota Bengkulu menjadi terkenal karena salah satu *The Founding Father of Indonesia* pernah diasingkan di sini dan menikah di sini. Dan kini, rumah pengasingan Soekarno menjadi salah satu tempat wisata sejarah di Bengkulu yang wajib dikunjungi. Berikut destinasi wisata yang dapat dikunjungi di Kota Bengkulu antara lain:

## 1. Rumah Pengasingan Bung Karno di Bengkulu

Rumah ini pada mulanya merupakan milik pengusaha Tionghoa yang bekerja untuk Belanda sebagai penyalur sembako bagi pemerintah Belanda, lalu setelah itu disewa oleh Belanda sebagai tempat Bung Karno diasingkan sekitar tahun 1938 – 1942.

Di tempat ini juga Soekarno bertemu dengan Ibu Fatmawati yang kelak menjadi istrinya dan merupakan orang yang menjahit bendera merah putih saat proklamasi 17 Agustus 1945. Walaupun berada di pengasingan, akan tetapi Soekarno tidak pernah berhenti menyusun berbagai strategi perjuangan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tempat wisata ini juga menyimpan bermacam benda bersejarah, diantaranya adalah sepeda

ontel kesayangan Bung Karno, surat cinta Bung Karno untuk Ibu Fatmawati, sampai dengan koleksi buku serta barang peninggalan Soekarno lainnya.

## 2. Pantai Panjang

Tempat wisata di Bengkulu yang pertama adalah pantai panjang. Pantai Panjang merupakan tempat wisata yang wajib kita kunjungi. Keindahan alamnya menjadi salah satu daya tarik pantai ini. Sesuai dengan namanya, pantai panjang ini mempunyai garis pantai mencapai tujuh km. Fasilitas yang tersedia di obyek wisata Bengkulu ini tergolong lengkap mulai dari penginapan, area bermain anak-anak, pusat belanja, sampai dengan restoran dan cafe serta tempat untuk berolahraga. Lokasinya juga sangat mudah sekali dijangkau. Hanya membutuhkan waktu 15 menit saja untuk mencapai pantai ini dari pusat kota. Di pantai ini anda dapat menikmati berbagai fasilitas seperti mulai dari penginapan, restoran, cafe, pusat perbelanjaan, arena bermain anak, hingga fasilitas olah raga. Di pantai ini juga para pengunjung pantai dapat berjogging ria atau juga bermain voli pantai.

## 3. Wisata Sejarah di Benteng Marlborough

Tempat wisata selanjutnya yang cukup terkenal adalah Benteng Marlborough. Benteng ini menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia melawan Inggris. Benteng Marlborough berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk kota Bengkulu sebagai suatu daerah perdagangan serta monopoli lada. Benteng yang dibangun pada 1713-1719 oleh East India Company (EIC) ini memiliki luas sekitar 44.100 meter persegi dengan panjang 240,5 m dan lebar 170,5 m, menghadap kearah selatan dan membelakangi Samudera Hindia. Untuk bangunan arsitekturnya, Banteng ini

mirip dengan kura-kura, terdapat jembatan yang menghubungkan bagian kepala dan badan, sebuah jembatan di atas parit yang membentuk ekor dan jembatan yang menghubungkan jalan masuk dengan bagian luar.

## 4. Pantai Tapak Paderi

Pantai Tapak Paderi merupakan salah satu tempat wisata populer di Bengkulu, Pantai ini dahulunya dijadikan sebagai pelabuhan penjajah Inggris. Pantai yang memiliki garis pantai panjang dan indah ini selalu ramai jika dikunjungi oleh para wisatawan. Pantai Tapak Paderi awalnya adalah pelabuhan laut pertama yang ada di Bengkulu yang bermanfaat sebagai pendukung transportasi laut pemerintah Inggris yang lokasinya dekat dengan Benteng Marlborough. Di pantai ini kita dapat menyaksikan keindahan matahari tenggelam dan dari atas Tapak Paderi akan terlihat cantiknya laut Bengkulu. Lokasinya pun tidak jauh dari Benteng Marlborough, hanya sekitar 100 meter saja. **(Indira)**



Benteng Marlborough



Rumah Pengasingan Bung Karno.

Sumber: Istimewa

# Upaya Mitigasi Bencana Perlu Disiapkan



Tingginya intensitas kebencanaan yang terjadi di Indonesia, selayaknya menjadi pertimbangan dalam perencanaan infrastruktur yang lebih adaptif.

Demikian terungkap dalam Diskusi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur PUPR dan Mitigasi Bencana.

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Bobby Prabowo mengatakan, perencanaan dan program Kementerian PUPR perlu memuat hal mengenai tanggap risiko bencana, agar dapat melakukan pengurangan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.

Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan aset infrastruktur PUPR, kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. "Untuk mencapai hal tersebut, tentunya diperlukan strategi dalam

penyelenggaraan kegiatan sektor PUPR yang terpadu dan sinkron," ungkap Bobby.

Konsep strategi tersebut perlu tertuang dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah yang berbentuk rencana pengembangan infrastruktur terpadu antarsektor, antartingkat pemerintah dan antarpulau. Hal ini penting, mengingat Indonesia merupakan salah satu kawasan yang termasuk rawan bencana.

Di tempat yang sama, pemerhati kebencanaan, Gegar Prasetya menjelaskan, posisi Indonesia berada kepungan tiga lempeng tektonik dunia yakni Lempeng Indo-Australian, Eurasia dan Lempeng Pasific.

"Apabila ketiga lempeng tektonik itu bertemu, dapat menghasilkan tumpukan energi yang memiliki ambang batas tertentu. Hal tersebut memicu terjadinya gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah," ungkapnya.

Posisi Indonesia juga berada pada *Pasific Ring Of Fire* atau cincin api, yakni jalur rangkaian gunung api paling aktif di dunia. **(ris/infoBPIW)**

# KBM Tanjung Selor Diharapkan Jadi Pendorong Perekonomian di Perbatasan

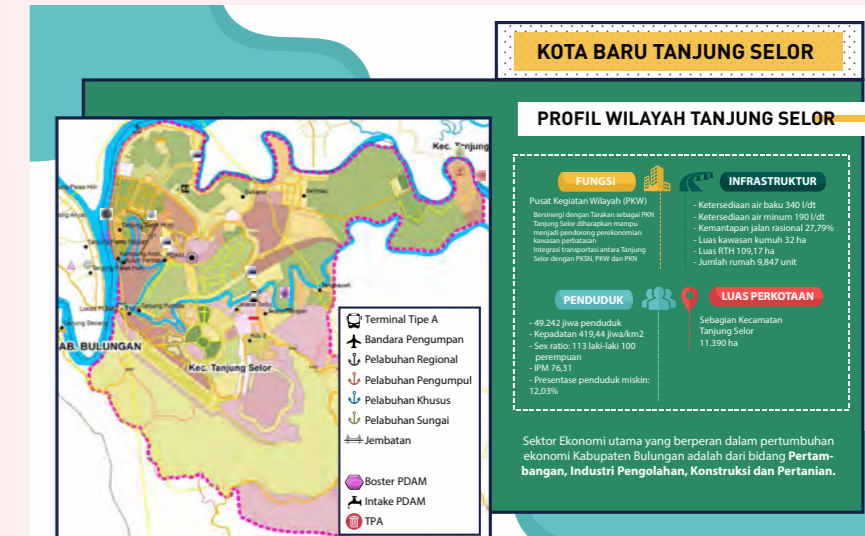
Pemerintah RI memastikan mempercepat pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor di Kalimantan Utara (Kaltara). Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama Kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor di Kantor Kementerian Koordinator (Menko) Perekonomian.

Pada penandatanganan kesepakatan yang dilakukan pada 27 Maret itu, Kementerian PUPR yang dilakukan Kepala BPIW, Hadi Suahyono yang mewakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Anita Firmanti.

Hadi mengungkapkan, Tanjung Selor saat ini masih berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Ke depannya, Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi didorong menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN,-red) yang dapat bersinergi dengan kabupaten/kota di sekitarnya," ungkap Hadi.

Hadi juga mengatakan, Tanjung Selor diharapkan menjadi pendorong perekonomian di kawasan perbatasan. Untuk itu, Tanjung Selor diarahkan sebagai pusat pemerintahan dan pendukung kawasan ketahanan pangan serta kawasan agroindustri yang produktif, berjatidiri dan lestari.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, BPIW pada tahun 2017 telah menyusun *Masterplan dan Development Plan* (MPDP,-red) infrastruktur PUPR serta Pra Desain Kawasan Prioritas Kota Baru



Tanjung Selor yang berisi konsep pengembangan serta indikasi kebutuhan infrastruktur PUPR yang terpadu," jelasnya.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2019 telah melakukan serangkaian kegiatan, antara lain pembangunan Jalan Long Nawang-Long Pujungan di Kab. Malinau, pembangunan Embung Indulung di Kota Tarakan, rehabilitasi dan renovasi satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kaltara.

"Kemudian, pembangunan rumah khusus dan pembangunan jaringan perpipaan SPAM," terangnya.

Pada tahun ini BPIW juga membantu pemerintah daerah untuk melakukan review design kawasan pemerintahan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang seluas 800 Ha serta menyusun rencana pengembangan tahap pertama yang mencapai 200 Ha. **(ris/infoBPIW)**

Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi didorong menjadi Pusat Kegiatan Nasional

# Penyusunan NUDP Untuk Tingkatkan Kemampuan Pemerintah Kota



BPIW Kementerian PUPR saat ini tengah melaksanakan kegiatan berupa *National Urban Development Project* (NUDP).

"Penajaman itu dilakukan dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak. Kami sangat mengharapkan masukan terkait dokumen yang ada, sehingga nanti akan kita sempurnakan," ujar Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga saat memimpin kegiatan tersebut.

Lebih lanjut Agusta menjelaskan sasaran utama dari NUDP adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kota pada perencanaan terintegrasi dan prioritas investasi.

Pencapaian tujuan utama NUDP tersebut menurutnya akan diukur dengan beberapa indikator seperti rencana tata ruang kota menggunakan pendekatan *spatial development framework* (kerangka pengembangan spasial), *spatial area framework* (kerangka kerja spasial), dan perencanaan kawasan prioritas.

Dalam kesempatan itu ia juga menjelaskan mengenai *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) atau kerangka kerja manajemen lingkungan dan sosial.

Menurut Agusta tujuan dari ESMF adalah memberikan referensi dan panduan bagi seluruh pihak yang berpartisipasi dalam NUDP terkait dampak lingkungan dan sosial yang potensial dari perencanaan tata ruang dan untuk menangani proses konsultasi proyek dan keluhan.

Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek itu mematuhi peraturan pemerintah Indonesia yang berlaku dan kebijakan pengaman lingkungan dan sosial dari Bank Dunia yang relevan.

"Kita sudah memiliki perencanaan kota yang bagus, tapi ada yang perlu diperbaiki dan disempurnakan seperti integrasi beberapa dokumen yang sudah ada peraturannya. Kemudian yang lebih komprehensif adalah penguatan penataan ruang," tuturnya.

Beberapa masukan dalam diskusi tersebut seperti dipertegasnya masalah cagar budaya dalam dokumen NUDP. Lucy dari Bank Dunia mengakui bahwa pihaknya belum menentukan, kota mana saja yang akan dijadikan proyek NUDP ini, dikarenakan Bank Dunia sedang membuat kerangka kerja terlebih dahulu.

Kegiatan tersebut dihadiri beberapa kalangan seperti dari Ikatan Ahli Perencana (IAP) dan perwakilan dari Bank Dunia yang dipimpin Gayatri. (Hen/infobpiw)

Sasaran utama dari NUDP adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kota

# Dukungan Infrastruktur PUPR Untuk Peningkatan Devisa Negara



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR tahun ini akan fokus pada pengembangan infrastruktur PUPR terhadap empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dari 12 KSPN yang juga terus dikembangkan. Keempat KSPN tersebut urutannya, Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat jumpa pers di arena PUPR 4.0 Expo menjelaskan, ke-12 KSPN tersebut yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Mandeh, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Bromo-Tengger-Semeru, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Toraja, Morotai dan Wakatobi.

Menurut Hadi, empat KSPN menjadi fokus pengembangan karena tren turis yang terus meningkat. Selain itu, mempunyai potensi lebih efisien untuk dikembangkan. "Artinya dengan adanya investasi, potensi ekonominya bisa lebih cepat berkembang," ungkap Hadi.

KSPN merupakan satu dari sekian tema kawasan yang mendapat dukungan pengembangan infrastruktur PUPR.

"Kawasan lain yang mendapat dukungan infrastruktur PUPR, yakni Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi

Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Perkotaan dan lainnya," terangnya.

Menurut Hadi, dukungan pengembangan infrastruktur di 12 KSPN, merupakan upaya pemerintah menjadikan 12 KSPN tersebut menjadi "Bali Baru". Dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di 12 KSPN tersebut, diharapkan lama tinggal wisatawan semakin bertambah.

Ia menambahkan, semakin lama wisatawan tinggal, maka akan membuat belanja yang dilakukan wisatawan akan lebih besar. Artinya, potensi devisa dan pertumbuhan ekonomi akan semakin lebih tinggi.

Untuk pengembangan KSPN Danau Toba, Kementerian PUPR telah meningkatkan infrastruktur berupa akses dari Bandara Silangit, baik jalan lingkaran luar maupun lingkaran dalam Danau Toba. Selain itu, Kementerian PUPR juga melakukan pengerukan alur sungai, serta akan membangun Jembatan Tano Ponggol. (tim/BPIW)

Semakin lama wisatawan tinggal, maka akan membuat belanja yang dilakukan wisatawan tersebut akan lebih besar.



# Keterpaduan dan Kemitraan Mutlak Dilakukan dalam Pembangunan Perkotaan



BPIW sebagai unit organisasi di Kementerian PUPR mengemban amanah antara lain, menyusun kebijakan dan strategi rencana serta program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, kawasan strategis, dan kawasan perdesaan. Kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar juga tak luput dari perhatian dari lembaga tersebut.

Dalam menyusun kebijakan BPIW juga memperhatikan masalah kebijakan-kebijakan perkotaan global yang telah ditetapkan, diantaranya *New Urban Agenda* (NUA) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

"Hal itu sebagai langkah untuk menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia," ujar Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat membuka acara "Curah Pendapat Strategi Pengembangan Infrastruktur Perkotaan Mendukung *New Urban Agenda*".

Keterpaduan dan kemitraan merupakan hal mutlak dilakukan dalam pembangunan perkotaan untuk pencapaian target-target SDGs. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus pandai dalam membangun kemitraan.

Saat memberi paparannya, Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Indonesia Bersatu dan Ketua Teman Serikat Kemitraan Habitat Dr.Ir Djoko Kimanto, Dipl.HE mengatakan, kota yang baik adalah kota yang nyaman dan aman terhadap bencana alam dan bencana sosial sehingga semua orang lebih produktif.

Untuk mewujudkan Kota Berkelanjutan dengan memperhatikan atau sensitif terhadap Tapak Ekologi (*Ecological Footprint*) dan responsif terhadap perubahan iklim (*Climate Change*) dan bencana.

Sementara untuk mewujudkan Kota Inklusif diperlukan peran seluruh lapisan masyarakat. Selain itu mendorong kolaborasi dengan pemerintah/pemda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi/ perguruan tinggi, asosiasi, dan sektor bisnis/swasta.

Mewujudkan Kota Inklusif juga dilakukan dengan mengutamakan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Kemudian menerapkan konsep pengembangan kota hijau.

Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabinet Persatuan Nasional, Erna Witoelar menambahkan, keterpaduan dan kemitraan merupakan hal mutlak dilakukan dalam pembangunan perkotaan untuk pencapaian target-target SDGs. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus pandai dalam membangun kemitraan. (**ris/ infoBPIW**)

# Rest Area Terpadu Merupakan Infrastruktur PUPR yang Multifungsi

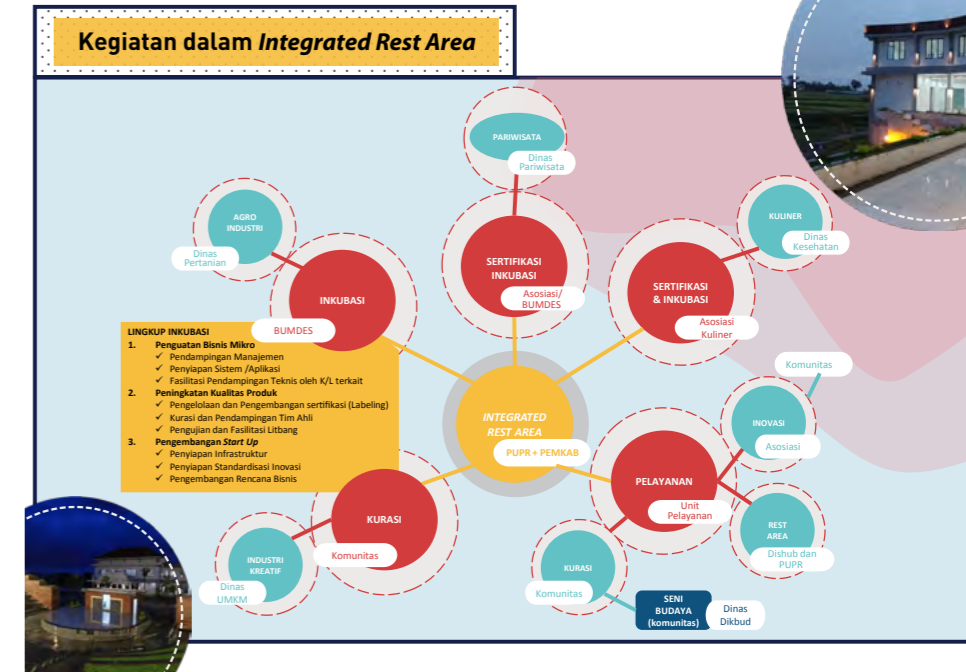
Guna memantapkan persiapan pengelolaan *Rest Area* Terpadu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar pembahasan yang diberi judul "Potensi Pengelolaan *Rest Area* Terpadu Tugu dan Rambut Siwi".

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan arahannya mengatakan, pada akhir tahun 2018 BPIW telah menyelesaikan pembangunan dua *Rest Area* Terpadu, yakni *Rest Area* Terpadu Tugu di Trenggalek, Jawa Timur dan *Rest Area* Terpadu Rambut Siwi di Jembrana, Bali.

"Sesuai arahan Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono, Kementerian PUPR berkomitmen akan menghibahkan secara penuh *Rest Area* Terpadu kepada pemerintah daerah, Pemkab Jembrana dan Pemkab Trenggalek. Hal itu untuk memudahkan kepada pemda untuk melakukan pengelolaan secara mandiri," ungkap Hadi.

Salah satu model pengembangan *growth center* (pusat pertumbuhan,-red) wilayah yang dilaksanakan BPIW adalah pembangunan *Rest Area* Terpadu. Bangunannya merupakan integrasi pembangunan infrastruktur PUPR yang memiliki multifungsi.

"Mulai dari berfungsi sebagai *rest area* (tempat istirahat,-red) dengan tambahan fungsi lain, yaitu sarana penyampaian informasi tentang infrastruktur PUPR dan penyediaan gedung serbaguna, sarana edukasi tentang infrastruktur PUPR, museum dan galeri, pengembangan Usaha



Kecil Menengah (UKM) seperti kuliner, kerajinan lokal dan lainnya," terang Hadi.

Fasilitas tersebut juga merupakan sarana untuk pengembangan kesenian lokal, berupa tempat pertunjukan kesenian dengan penyediaan amphitheater, gardu pandang untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan jaringan internet gratis.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Jembrana, I Made Hartawan dan Wakil Bupati Trenggalek, M. Arifin yang masing-masing didampingi jajarannya. (**ris/ infoBPIW**)

Salah satu model pengembangan *growth center* (pusat pertumbuhan,-red) wilayah yang dilaksanakan BPIW adalah pembangunan *Rest Area* Terpadu.

# Empat Infrastruktur Publik Ramah Gender

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR *responsive* gender, agar tidak ada kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan, anak-anak dan penyandang cacat dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan

infrastruktur PUPR. Kementerian PUPR pun telah memberikan bukti dalam pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan isu *responsive gender*. Berikut empat contoh bangunan ramah gender yang telah dibangun Kementerian tersebut.



## 1. Ruang Laktasi

Dewasa ini jumlah perempuan bekerja meningkat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan perempuan dalam suatu bidang pekerjaan tidak bisa disepelekan karena banyak di antaranya menduduki jabatan-jabatan penting.

Untuk mendukung peran perempuan pekerja, agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu, maka Kementerian PUPR menyediakan fasilitas ruang laktasi di lingkungan kampus PUPR. Fasilitas ini dibangun guna mendukung program Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.

## 2. Jalur Kursi Roda

Pembangunan jalur kursi roda hadir di lingkungan Kementerian PUPR, seperti jalur akses menuju gedung sehingga bisa cukup mudah digunakan banyak pihak. Termasuk, penyandang cacat dan anak-anak.



## 3. Toilet untuk Penyandang Disabilitas

Toilet untuk penyandang disabilitas dibuat berbeda disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dimulai dari ruangan yang lebih luas, sehingga memungkinkan orang lain untuk turut masuk dan membantu.

Selain itu, di sebelah toilet juga disediakan penyangga tangan yang dimaksudkan untuk membantu pengguna toilet berdiri.

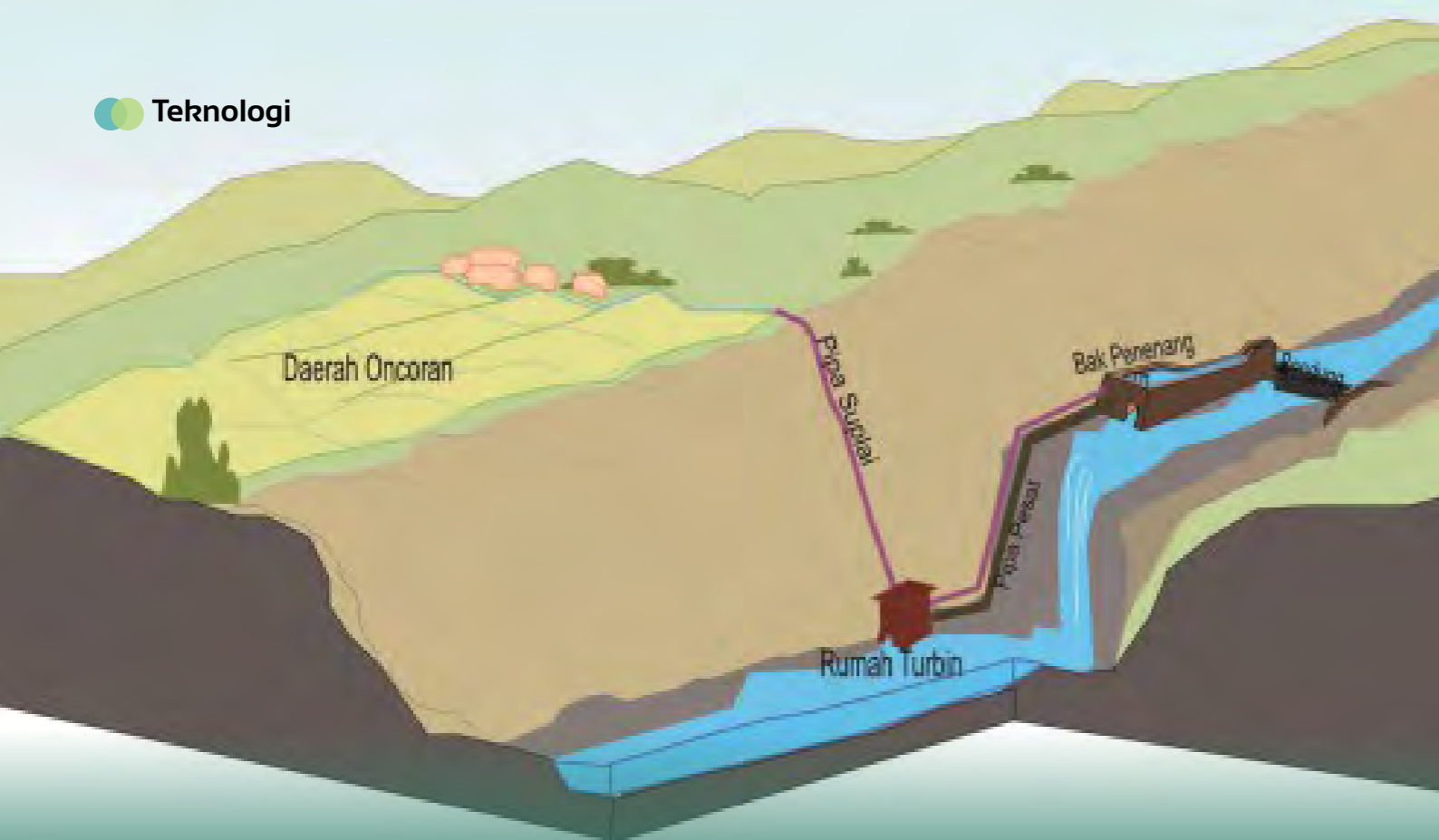
Kementerian PUPR telah menyediakan fasilitas ini di *venue Aquatic* Gelora Bung Karno.



## 4. Jalur Kuning untuk Tunanetra

Jalur kuning yang banyak ditemui di fasilitas umum, seperti trotoar, perkantoran, dan stasiun merupakan jalur yang digunakan untuk tunanetra untuk menunjukkan arah. Jalur kuning dibuat khusus berbeda bentuk dari jalanan pada umumnya.

Kementerian PUPR juga telah menyediakan fasilitas ini di kawasan trotoar Gelora Bung Karno. (syifa/berbagai sumber)



## Kementerian PUPR Kembangkan Teknologi yang Memanfaatkan Energi Air

Kementerian PUPR melalui Balitbang telah mengembangkan Pompa Air Tenaga Hidro (PATH). Teknologi tersebut merupakan teknologi pompa air dengan memanfaatkan energi air untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan poros pompa sehingga dapat menaikkan air ke lokasi dengan elevasi yang lebih tinggi. PATH tidak memerlukan energi listrik atau bahan bakar minyak sebagai energi penggerak pompa sehingga biaya operasional menjadi lebih murah. Teknologi ini telah diterapkan di tiga lokasi yaitu Temanggung, Magelang, dan Pacitan.

Keunggulan yang didapat dari penerapan teknologi PATH dengan *head* rendah adalah (1) tidak memerlukan bendung yang tinggi dan saluran distribusi yang panjang untuk melayani lokasi yang lebih tinggi, (2) merupakan energi yang terbarukan dan tidak menghasilkan

emisi gas karbon, sehingga biaya OP murah karena tidak memerlukan Listrik/ BBM, (3) Menghilangkan 2 kehilangan energi yaitu pada generator dan motor, dibandingkan sistem konvensional (PLTMH) karena tidak mengkonversi listrik.

PATH dengan *head* rendah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku di Desa Kledung, Pacitan. Pemanfaatan energi air untuk pengambilan air baku menggabungkan dua teknologi penyediaan air secara lebih ringkas. Dengan teknologi ini dapat meniadakan kebutuhan panjang saluran pengantar untuk sampai pada lokasi pemanfaatan air baku. Pemompaan air sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi teknologi yang diterapkan memerlukan energi listrik atau bahan bakar minyak untuk operasionalnya. Hal tersebut

memerlukan biaya operasional yang tinggi, sehingga sering menjadi tidak layak apabila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.

Teknologi pemompaan air tenaga hidro dapat digunakan untuk menekan biaya operasional pompa tanpa memerlukan energi listrik atau bahan bakar minyak. Sumber energi air didapatkan dari kenaikan tinggi muka air hasil pembendungan.

Energi air ini akan menggerakkan turbin dan putaran turbin, yang selanjutnya menggerakkan atau memutar pompa. Teknologi yang diteliti pada kegiatan ini adalah pompa air tenaga hidro dengan *head* rendah, *head* tersebut hanya didapatkan dari hasil pembendungan.

Terdapat tiga jenis turbin yang dapat digunakan untuk teknologi ini diantaranya:

### 1. Turbin *Crossflow* dan Pompa Sentrifugal

adalah Turbin untuk *head* tinggi, Pompa untuk debit besar.

### 2. Turbin propeller tubular S dan Pompa Piston

adalah Turbin untuk *head* rendah, Pompa untuk tekanan tinggi.

### 3. Turbin *open flume* dan Pompa Sentrifugal

Adalah Turbin untuk *head* rendah dan debit kecil, Pompa untuk debit besar.

Tipe turbin yang dapat digunakan untuk kondisi tinggi energi rendah tapi mampu menghasilkan daya yang optimal, salah satunya adalah tipe propeler. Pemasangan turbin tipe propeler yang terhubung dengan pompa di dalam tubuh bendung, diharapkan dapat menaikkan air ke elevasi yang lebih tinggi dengan debit sesuai kebutuhan.

PATH yang diterapkan di Sungai Dugromo ini didesain dengan debit turbin sebesar 330 L/s dan *head* 4 meter, mampu memompa air sebesar 1 L/s ke ketinggian 300 m, dengan kebutuhan air Dugromo sebesar 60 L/hari/jiwa. Dari hasil uji coba turbin tipe turbo propeller 430, dan pompa piston Sanchin model SC-120, PATH mampu menaikkan air dengan debit sebesar 1,32 L/s sampai beda elevasi 300 m dengan debit turbin 251 L/s dan tinggi *head* 4 meter. (Dara/Balitbang)

Teknologi pemompaan air tenaga hidro dapat digunakan untuk menekan biaya operasional pompa tanpa memerlukan energi listrik atau bahan bakar minyak



Turbin Propeller Tubular Tipe S dan Pompa Piston Turbin Crossflow dan Pompa Centrifugal Sinalastae Turbin Open Flume dan Pompa Centrifugal Multistage

## Konreg 2019, Sinergikan Program Infrastruktur 2020



Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono saat menyampaikan arahan pada Konreg di Kota Mataram.

Foto bersama usai pembukaan Konreg untuk wilayah provinsi Sulawesi dan Papua di Kota Makassar.

Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono saat menghadiri Konreg untuk wilayah provinsi Sumatra di Kota Banda Aceh.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono saat menyampaikan arahan pada Konreg di Kota Mataram.

Suasana desk saat proses pembahasan program.

**K**ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menggelar serangkaian Konsultasi Regional (Konreg) untuk menyusun program 2020. Konsultasi Regional (Konreg) 2019 merupakan forum konsolidasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan terkait perumusan program pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2020.

## BPIW Ramaikan PUPR 4.0 Expo



Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono saat menghadiri forum diskusi menyampaikan apresiasi.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono saat memaparkan kinerja BPIW.

Widyaiswara Kementerian PUPR, Imam S Ernawi saat paparan dalam forum diskusi pengembangan kota berkelanjutan di Indonesia.

Usai acara diskusi, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono diwawancarai wartawan cetak dan elektronik nasional.

Kepala BPIW, Hadi Suahyono berbincang dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono di sela-sela acara PUPR 4.0 Expo.

**D**alam rangka meramaikan PUPR 4.0 Expo yang digelar di Ruang Serbaguna Kementerian PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR turut berpartisipasi menggelar expo dan diskusi yang bertajuk "Peran Generasi Muda dan Kampus dalam Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur PUPR", Rabu (13/2). Forum diskusi tersebut menghadirkan narasumber Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suahyono dan Pakar Perkotaan, Nirwono Yoga yang dipandu moderator komedian, Ronal Surapradja. Sebelumnya hadir narasumber Widyaiswara Kementerian PUPR, Imam S Ernawi. Jalan diskusi dibawakan serius tapi santai ini mengalir yang kerap diwarnai gelak tawa.

# Quiz BPIW

EDISI 38

## PERTANYAAN

1. Kementerian PUPR melalui BPIW saat ini tengah melakukan percepatan pengembangan Kota Baru Mandiri (KBM). KBM apa yang lokasinya di Provinsi Maluku Utara?
2. Sebutkan empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi prioritas untuk dikembangkan?
3. Sebutkan dua Rest Area Terpadu percontohan yang telah dibangun BPIW?

## KETENTUAN

Dua orang pemenang akan mendapatkan *souvenir cantik* dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : [humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id). Jawaban juga dapat disampaikan melalui *WhatsApp No: 0812-9897-4748* disertakan *scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir*. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 39, April 2019.

## JAWABAN KUIS EDISI 37

### Jawaban

1. Kawasan Perbatasan Negara; Program terkait Lingkungan, Perubahan Iklim, Mitigasi Bencana, Cagar Budaya, dan Kawasan Konservasi
2. NUDP kepanjangan dari National Urban Development Program
3. Konurbasi adalah Konurbasi merupakan urban area atau aglomerasi yang terdiri dari beberapa kota besar, kota kecil, dan daerah urban yang mana terjadi perumbuhan penduduk dan pembangunan fisik secara besar-besaran.

## PEMENANG KUIS EDISI 37

1. Lanang Adji Sulaksono  
Pusat Bendungan, Kemen PUPR
2. Yurisal  
Ditjen PnP

# TIPS SEHAT SETELAH MAKAN GORENGAN

**G**orengan merupakan salah satu makanan mengandung kolesterol yang sangat tinggi, dan dapat mengganggu kesehatan tubuh. Namun disatu sisi, gorengan merupakan salah satu kudapan yang menjadi favorit para masyarakat, Gorengan ini menjadi salah satu makanan yang murah meriah dan juga memiliki rasa yang lezat. Akan tetapi sekarang ini haruslah mulai waspada. Oleh karena itu, apa saja tips yang bisa kita lakukan agar tetap sehat walau memakan gorengan? Cek artikel dibawah ini

Terkadang ketika makan gorengan kita menjadi kesal karena gorengan itu berminyak, sehingga membuat kita menjadi agak tak nyaman ketika makan. Selain membuat mulut dan tangan menjadi berminyak, minyak dalam gorengan itu mengandung lemak jahat yang bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh dan selain itu juga bisa membuat tenggorokan kita menjadi sakit.

Oleh karena itu sebelum makan gorengan, sebaiknya gunakanlah *tissue* untuk menyerap minyak gorengan itu. Jika anda tidak ingin *tissue* menempel di gorengan, maka kami menyarankan supaya anda menggunakan *tissue* makan atau tissue khusus menyerap minyak makanan karena sekarang sudah dijual di pasaran. Pastikan benar-benar minyak yang ada di gorengan itu diserap dengan baik oleh *tissue*.

### 1. Jangan makan gorengan ketika masih panas atau baru diangkat

Tips yang selanjutnya adalah jangan memakan gorengan ketika baru saja diangkat dari penggorengan atau ketika masih panas. Selain bisa membuat mulut anda terluka karena panas, gorengan yang masih panas atau baru saja diangkat itu memiliki zat akrilamida yang berpotensi menghasilkan radikal bebas tinggi dalam tubuh. Resiko lain adalah, anda tidak hanya terkena kolesterol saja melainkan juga bisa berpotensi terkena kanker. Jadi mulai sekarang jika anda ingin makan gorengan sebaiknya diamkan sejenak, dan biarkan menjadi hangat.

### 2. Minum air putih yang banyak

Tips yang ketiga adalah minum air putih sebanyak mungkin setelah memakan gorengan. Kita semua tahu jika air putih ini adalah salah satu minuman yang baik untuk tubuh, karena dapat menyeimbangkan metabolisme tubuh dan juga dapat membuang segala racun yang ada di dalam tubuh kita.

### 3. Makanlah timun setelah makan gorengan

Tips yang selanjutnya adalah makan timun setelah makan gorengan. Seperti yang kita tahu, makanan

gorengan mengandung minyak dan umumnya kita makan ketika masih panas karena rasanya yang lezat. Nah gorengan ini jika dimakan panas akan menimbulkan senyawa atau zat yang bernama karsinogenik yang mana bisa menyebabkan tumbuhnya sel kanker dalam tubuh kita.

Jika ingin mengusir zat berbahaya tersebut, maka kami menyarankan agar kita mengkonsumsi timun sehabis makan gorengan. Karena didalam mentimun ini kita dapat menemukan kandungan vitamin C, polifenol, dan juga karoten yang mana bisa mengurangi radikal bebas penyebab kanker tersebut. Selain itu, timun juga bisa melegakan tenggorokan dan juga bisa mendinginkan lambung kita yang baru saja mengkonsumsi gorengan.

### 4. Minumlah perasan air lemon

Setelah memakan gorengan biasanya tubuh kita akan terasa panas terutama di bagian perut ataupun tenggorokan. Jika anda ingin tubuh kembali dingin setelah kita mengkonsumsi gorengan, maka sebaiknya setelah makan gorengan, minumlah minuman yang menyegarkan seperti misalnya saja air perasan lemon. Air perasan lemon ini bisa menyegarkan tenggorokan kita dan juga bisa mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh kita.

### 5. Makanlah buah Apel

Solusi terakhir yang bisa kita lakukan setelah makan gorengan adalah dengan mengkonsumsi buah. Selain mengandung berbagai vitamin dan mineral, buah ini menjadi salah satu solusi yang baik yang bisa kita lakukan setelah makan gorengan.

Buah apel ini baik untuk dikonsumsi setelah makan gorengan karena senyawa yang ada didalam buah apel ini baik untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau yang kita sebut sebagai LDL. Selain itu buah apel juga bisa menjaga kesehatan jantung kita dan juga menjaga kesehatan pembuluh darah. **(Indira/dari berbagai sumber)**



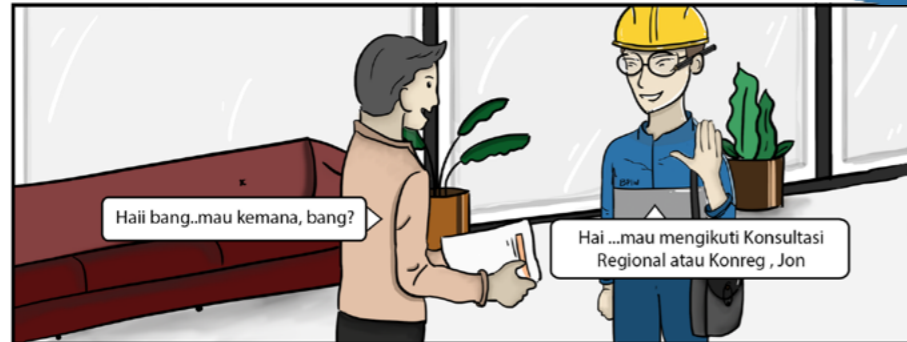
# Obras

Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari "Sinergi".

## BANG EGI



### Konsultasi Regional 2019



# SELAMAT & SUKSES

ATAS TERSELENGGARANYA

## Konsultasi Regional | PUPR 2019



Mataram • Makassar • Banda Aceh • Bogor





**Buletin Sinergi ini dapat didownload melalui:  
[bpiw.pu.go.id/publication/bulletin](http://bpiw.pu.go.id/publication/bulletin)**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)**  
Kementerian PUPR

